

Bidang Unggulan : Rekayasa Sosial & Pengembangan Pedesaan
Kode/Nama Rumpun Ilmu : 594/Ilmu Administrasi

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN 2019
PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL**



**KAJIAN KEBIJAKAN PENDAMPING PROFESIONAL
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
DI PROVINSI GORONTALO**

TIM PENELITI

**Prof. DR. ANI M. HASAN, M.Pd (Ketua)
DR. ROSMAN ILATO, M.Pd (Anggota)
DR. ABD. RAHMAN PAKAYA, M.Si (Anggota)
DRS. HARIS MAHMUD, S.Pd, M.Si (Anggota)
JUPRIANTO PULUHULAWA, S.H, M.H (Anggota)**

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

NOVEMBER 2019

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL

Judul Penelitian : Kajian Kebijakan Pendamping Profesional Dalam
Pengelolaan Dana Desa di Provinsi Gorontalo

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 594/Illmu Administrasi

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Prof. DR. Ani M. Hasan, M.Pd
b. Bidang Ilmu : Pendidikan Biologi
c. Nomor HP : 085395587000
d. Alamat surel (e-mail) : ani m. hasan@yahoo.co.id
e. Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Gorontalo

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : DR. Rosman Ilato, M.Pd
b. Bidang Ilmu : Administrasi Publik

Anggota Peneliti (2)

a. Nama Lengkap : DR. Abd. Rahman Pakaya, M.Si
b. Bidang Ilmu : Manajemen

Anggota Peneliti (3)

a. Nama Lengkap : DRS. Haris Mahmud, S.Pd, M.Si
b. Bidang Ilmu : Sosiologi

Anggota Peneliti (4)

a. Nama Lengkap : Jupriyanto Puluhulara, SH, MH
b. Bidang Ilmu : Hukum

Lama Penelitian Keseluruhan : 3bulan
Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp.250.000.000.

Gorontalo, 15 November 2019

Mengetahui
Ketua LPPM Universitas Negeri Gorontalo,

Ketua Peneliti,

Prof. DR. ISHAK ISA, MSi
NIP.196105261987031005

Prof. DR. Ani M. Hasan, M.Pd
NIP. 196004231986031001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
RINGKASAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	2
C. TUJUAN PENELITIAN.....	3
D. URGENSI PENELITIAN.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
A. SUBSTANSI PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENDAMPINGAN DESA.....	4
B. ALOKASI DANA DESA.....	8
C. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR.....	10
D. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.....	12
E. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN.....	16
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN.....	21
B. PENDEKATAN DAN METODE PENELITIAN.....	21
C. POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN.....	22
D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	23
E. TEKNIK ANALISIS DATA.....	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
A. HASIL PENELITIAN.....	28
B. PEMBAHASAN.....	56

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI PENELITIAN	63
A. KESIMPULAN.....	63
B. REKOMENDASI.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN.....	68

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Populasi dan Sampel Penelitian.....	23
Tabel 3.2 Responden/Informan berdasarkan Status Desa.....	23
Tabel 3.3 Bobot Skor dan Alternatif Jawaban Angket.....	25
Tabel 3.4 Kriteria Penilaian.....	27
Tabel 4.1 Status Desa di Provinsi Gorontalo Tahun 2016.....	28
Tabel 4.2 Status Desa di Provinsi Gorontalo Tahun 2019.....	29
Tabel 4.3 Perbandingan Status Desa Tahun 2016 dan Tahun 2019.....	29
Tabel 4.4 Kondisi Eksisting Tenaga Pendamping Profesional Desa.....	30
Tabel 4.5 Kesesuaian Jumlah Desa Wilayah Kerja Pendamping Desa.....	31
Tabel 4.6 Kesesuaian Jumlah Pendamping Desa dengan kondisi geografis.	32
Tabel 4.7 Kesesuaian Jumlah Pendamping Desa dengan permasalahan.....	33
Tabel 4.8 Jumlah Desa merupakan gabungan Status Desa.....	34
Tabel 4.9 Jumlah Desa sesuai dengan Geografis/Kompleksitas Desa.....	35
Tabel 4.10 Hasil Akumulasi Rumusan Masalah Pertama.....	36
Tabel 4.11 Kesesuaian Penyebaran Pendamping dengan kondisi geografis.	37
Tabel 4.12 Kesesuaian Penyebaran Pendamping dengan permasalahan.....	38
Tabel 4.13 Kesesuaian Penyebaran Pendamping dengan Status Desa.....	39
Tabel 4.14 Kesesuaian Penyebaran Pendamping dengan kemampuan fisik.	40
Tabel 4.15 Kesesuaian Penyebaran Pendamping dengan kondisi geografis.	41
Tabel 4.16 Hasil Akumulasi Rumusan Masalah Kedua.....	42
Tabel 4.17 Dukungan kualifikasi pendidikan dalam pelaksanaan Tupoksi..	43
Tabel 4.18 Kesesuaian tingkat pendidikan dengan kebutuhan masyarakat...	44
Tabel 4.19 Kesesuaian Bidang Keilmuan dengan pelaksanaan Tupoksi.....	45
Tabel 4.20 Kesesuaian Bidang Keilmuan dengan kebutuhan masyarakat....	46
Tabel 4.21 Diklat Teknis menunjang pelaksanaan Tupoksi.....	47
Tabel 4.22 Hasil Akumulasi Rumusan Masalah Ketiga.....	48
Tabel 4.23 Penyampaian besaran gaji sebelum pelaksanaan program.....	49
Tabel 4.24 Tidak ada kecemburuan dalam besaran gaji dan tunjangan lain.	50
Tabel 4.25 Besaran gaji/tunjangan sesuai dengan kebutuhan minimal.....	51
Tabel 4.26 Besaran gaji/tunjangan sesuai dengan upah minimum regional..	52

Tabel 4.27 Pendamping Desa tidak mencari tambahan pendapatan.....	53
Tabel 4.28 Hasil Akumulasi Rumusan Masalah Keempat.....	54
Tabel 4.29 Hasil Akumulasi Rumusan Pertama, Kedua, Ketiga, dan keempat.....	55

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Instrumen Penelitian.....	68
Lampiran 2 Indeks Desa Membangun Provinsi Gorontalo.....	75
Lampiran 3 Bio Data Tim Peneliti.....	108
Lampiran 4 Profil Lembaga Periset.....	129

RINGKASAN

Permasalahan riil seperti: Provinsi Gorontalo termasuk pada 5 Provinsi termiskin di Indonesia, Indeks Pembangunan Manusia ranking 28, produktivitas tenaga kerja ranking 27, PDRB Perkapita pertahunnya Rp.27.654.000 (ranking 28), kualifikasi Pendidikan aparatur dan masyarakat desa yang relative masih perlu ditingkatkan; serta prioritas Alokasi Dana Desa untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menuntut agar pengelolaan dana desa dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Dalam kaitan inilah maka diperlukan penelitian Kajian Kebijakan Pendamping Profesional dalam Pengelolaan Dana Desa di Provinsi Gorontalo.

Tema Unggulan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo tahun 2015-2019 adalah “Strategi Pemberdayaan Potensi Daerah untuk Penguatan Budaya dan Kesejahteraan Masyarakat”.

Rumusan masalah penelitian adalah: 1) Apakah jumlah Pendamping Desa sudah memadai jika dikaji dari Kondisi Geografis dan Variasi Kompleksitas permasalahan di Desa; 2) Apakah penyebaran Pendamping Desa sudah memadai jika dikaji dari kondisi Geografis Desa; 3) Apakah Kualifikasi pendidikan (tingkat pendidikan, bidang ilmu, dan Diklat Teknis) Pendamping Desa Menunjang dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya; dan 4) Apakah Gaji Pendamping Desa sudah Adil dan Cukup jika dikaji dari Kondisi Perekonomian dan Kondisi Geografis Desa;

Penelitian ini menggunakan gabungan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dengan analisis kuantitatif deskriptif dan kualitatif deskriptif. Metode riset yang digunakan adalah metode survey. Lokasi penelitian adalah lima Kabupaten se Provinsi Gorontalo, yang terdiri dari Kabupaten Gorontalo, Boalemo, Pohuwato, Gorontalo Utara, dan Bone Bolango.

Sebagai kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1). Nilai rata-rata persentase Variabel Kesesuaian jumlah Pendamping Desa dikaji dari Kondisi Geografis dan Variasi Kompleksitas permasalahan di Desa adalah **79.78%**, yang berarti termasuk pada Kategori **Sesuai (71-85%)**, 2). Nilai rata-rata persentase Indikator Kesesuaian jumlah Pendamping Desa dikaji dari Kondisi Geografis dan Variasi Kompleksitas permasalahan di Desa adalah **77.34%**, yang berarti termasuk pada Kategori **Sesuai (71-85%)**, 3) Nilai rata-rata persentase Indikator dukungan kualifikasi pendidikan (tingkat pendidikan, bidang ilmu, dan diklat teknis) Pendamping Desa dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah **82.84%**, yang berarti termasuk pada Kategori **Sesuai (71 – 85%)**, 4) Nilai rata-rata persentase Indikator Gaji Pendamping Desa berdasarkan kondisi perekonomian dan kondisi geografis Desa adalah **67.62%**, yang berarti termasuk pada Kategori **Kurang Sesuai (51 – 70%)**, 5) Eksistensi Pendamping Profesional Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Provinsi Gorontalo, belum seluruhnya tercukupi sesuai ketentuan yang berlaku. dan 6) Perbandingan Status Desa di Provinsi Gorontalo Tahun 2016 dan 2019 adalah: a) Status Desa Mandiri tetap tidak ada, b) Status Desa Maju meningkat dari 14 Desa menjadi 82 Desa, c) Status Desa Berkembang meningkat dari 265 Desa menjadi 414 Desa, d) Status Desa Tertinggal menurun dari 349 Desa menjadi 154 Desa, dan e) Status Desa Sangat Tertinggal menurun dari 29 Desa menjadi 7 Desa.

Kata Kunci: Pendamping Profesional Desa, Pengelolaan Dana Desa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah RI nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, khususnya Pasal 19 ayat 2 dinyatakan bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah: 1) untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan yang dimilikinya, 2) untuk meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi desa, 3) untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat desa, dan 4) untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip, seperti: 1) seluruh kegiatan yang dibiayai ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, dan 2) semua kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, secara teknis, dan secara hukum.

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dibagi ke dalam 2 bagian yaitu: 30% dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk untuk BPD dan tim pelaksana ADD. Sedangkan 70% dipergunakan antara lain untuk: 1) pembangunan sarana prasarana ekonomi desa, 2) pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama untuk mengentaskan kemiskinan.

Permasalahan lain adalah pengalokasian Dana Desa baik yang bersumber dari APBN maupun APBD I dan APBD II menuntut kesiapan aparatur dan masyarakat desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban ADD. Sementara fakta riil menunjukkan bahwa tingkat pendidikan serta tingkat pengetahuan dan ketrampilan aparatur dan masyarakat desa pada berbagai aspek terutama dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan ADD masih perlu lebih ditingkatkan lagi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah jumlah Pendamping Desa sudah memadai jika dikaji dari Kondisi Geografis dan Variasi Kompleksitas permasalahan di Desa;
2. Apakah penyebaran Pendamping Desa sudah memadai jika dikaji dari kondisi Geografis Desa;

3. Apakah Kualifikasi pendidikan (tingkat pendidikan, bidang ilmu , dan Diklat Teknis) Pendamping Desa Menunjang dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya; dan
4. Apakah Gaji Pendamping Desa sudah Adil dan Cukup jika dikaji dari Kondisi Perekonomian dan Kondisi Geografis Desa;

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Apakah jumlah Pendamping Desa sudah memadai jika dikaji dari Kondisi Geografis dan Variasi Kompleksitas permasalahan di Desa;
2. Apakah penyebaran Pendamping Desa sudah memadai jika dikaji dari kondisi Geografis Desa;
3. Apakah Kualifikasi pendidikan (tingkat pendidikan, bidang ilmu , dan Diklat Teknis) Pendamping Desa Menunjang dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya; dan
4. Apakah Gaji Pendamping Desa sudah Adil dan Cukup jika dikaji dari Kondisi Perekonomian dan Kondisi Geografis Desa;

D. Urgensi Penelitian

Riset ini dipandang sangat urgen karena semua tahapan kegiatan penelitian serta luaran penelitiannya dapat digunakan oleh pemerintah pusat serta daerah dan desa bahkan dapat diadopsi oleh daerah lain dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui peran tenaga Pendamping Profesional dalam Pengelolaan Dana Desa.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Substansi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa, Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi Desa. Selanjutnya pada Pasal 2 disebutkan bahwa Tujuan Pendampingan Desa meliputi:

- a. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa;
- b. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif;
- c. Meningkatkan sinergi pembangunan desa antarsektor, dan
- d. Mengoptimalkan asset lokal desa secara emansipatoris.

Pada Pasal 5 disebutkan bahwa Tenaga Pendamping Profesional terdiri atas: a. Pendamping Desa, b. Pendamping Teknis, dan c. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat. Selanjutnya pada Pasal 11 disebutkan bahwa Pendamping Desa bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pada Pasal 12 disebutkan bahwa Pemdamping Desa melaksanakan tugas mendampingi Desa, meliputi:

- a. Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. Mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan social dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- d. Melakukan pengorganisasiandi dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa;
- e. Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru;
- f. Mendampingi Desa dalam pembangunan Kawasan perdesaan secara partisipatif; dan
- g. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat Kecamatan dan memfasilitas laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 13 dan 14 menyebutkan Pendamping Teknis bertugas mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral, yang terdiri dari:

- a. Membantu Pemerintah Daerah dalam hal sinergitas perencanaan pembangunan Desa;
- b. Mendampingi Pemerintah Daerah melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang terkait dengan Desa;
- c. Melakukan fasilitasi kerja sama Desa dan pihak ketiga terkait Pembangunan Desa.

Pada Pasal 15, 16, dan 17 disebutkan bahwa: Tugas utama Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat mencakup bantuan Teknis keahlian bidang manajemen, kajian keuangan, pelatihan dan peningkatan kapasitas, kaderisasi, infrastruktur pedesaan, dan regulasi. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dalam hal teknis pemberdayaan masyarakat Desa, dapat dibantu oleh Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, yang bertugas:

- a. Membantu Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dalam melakukan fasilitasi perumusan kebijakan dan peraturan terkait pemberdayaan dan pendampingan masyarakat Desa;
- b. Membantu Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dalam melakukan asistensi, menyusun rancangan pelatihan dan fasilitasi pelatihan terhadap Pendamping Desa, Pendamping Teknis, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan pihak ketiga;
- c. Membantu Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dalam hal melaksanakan pengendalian pendampingan dan evaluasi pendampingan Desa.

Pada BAB III Manajemen Pendampingan Desa, khusus Pasal 24 disebutkan bahwa Kompetensi Pendamping Desa sekurang-kurangnya memenuhi unsure kualifikasi antara lain:

- a. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat;
- b. Memiliki pengalaman dalam pengorganisasian masyarakat Desa;
- c. Mampu melakukan pendampingan usaha ekonomi masyarakat Desa;
- d. Mampu melakukan teknik fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat Desa dalam musyawarah Desa; dan/atau

- e. Memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat Desa.

Selanjutnya pada Pasal 25 disebutkan bahwa kompetensi Pendamping Teknis memenuhi unsur kualifikasi sebagai berikut:

- a. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasi pelaksanaan program dan kegiatan sektoral;
- b. Memiliki pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat dan pengorganisasian masyarakat;
- c. Memiliki pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerja sama antar lembaga kemasyarakatan; dan/atau
- d. Mampu melakukan analisis kebijakan terhadap implementasi program di wilayahnya.

Pada Pasal 26 disebutkan bahwa kompetensi Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat sekurang-kurangnya memenuhi unsur kualifikasi antara lain:

- a. Memiliki pengalaman dalam pengendalian dan manajemen program pemberdayaan masyarakat;
- b. Memiliki pengalaman dalam peningkatan kapasitas dan pelatihan pemberdayaan masyarakat; dan
- c. Memiliki pengalaman dalam analisis kebijakan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya tentang Sertifikasi Kompetensi Pendamping Profesional disebutkan pada pada Pasal 27 sebagai berikut:

- a. Tenaga Pendamping Profesional harus memiliki sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi;

- b. Sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan secara bertahap.

B. Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, khususnya ketentuan pada pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2), dinyatakan bahwa salah satu sumber pendapatan desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bahwa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada desa perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan Pendapatan dan Belanja Negara.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Selanjutnya dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dikemukakan bahwa Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.

Apabila jumlah anggaran yang diberikan ke masing-masing desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD) utamanya yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) yang diperkirakan jumlahnya sekitar 1 milyar, benar-benar telah terrealisasi, maka muncul pertanyaan apakah aparaturnya dan masyarakat desa beserta berbagai komponen yang ada sudah mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara efektif dan efisien. Hal ini mengingatkan bahwa desa terbiasa dengan melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang jumlahnya terbatas dan pengelolaannya masih sangat sentralistik oleh satuan instansi pemerintahan. Namun setelah diberlakukan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD), sekarang Desa akan mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar bahkan pengelolaannya dilakukan secara mandiri, dan hal inilah yang menyebabkan adanya keraguan terhadap kemampuan aparaturnya dan masyarakat desa secara internal untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan Alokasi Dana Desa tersebut.

Selain itu Desa juga masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu, khususnya pada organisasinya pemerintahannya, sehingga hal tersebut juga turut mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan pertanggungjawaban alokasi Dana Desa tersebut. Wasistiono dan Tahir dalam (Thomas; 2013) menyatakan bahwa unsur kelemahan yang dimiliki pemerintah desa pada umumnya, yaitu: 1) kualitas sumber daya aparaturnya yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah, 2) belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa, sejak dikeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, masih diperlukan beberapa aturan pelaksana baik sebagai pedoman maupun sebagai operasional, 3) rendahnya kemampuan perencanaan di tingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara output (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan input dari kebijakan, 4) sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain

mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas, dan pekerjaan.

C. Pembangunan Infrastruktur

Berdasarkan studi yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya mengenai pembangunan infrastruktur dan peningkatan status sosial dan ekonomi masyarakat, dapat disimpulkan bahwa beragam jenis pembangunan infrastruktur memberikan pengaruh yang sangat penting dalam menunjang perkembangan peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat secara khusus serta perkembangan peningkatan sosial dan ekonomi desa secara umum.

Secara umum infrastruktur adalah *physical and social overhead capital* yang harus disediakan sebagai media layanan publik yang berfungsi memberikan lingkungan kondusif bagi berkembangnya kegiatan individu dan masyarakat. Berdasarkan pada jenisnya, infrastruktur didefinisikan dengan cukup beragam mulai dari bentuk infrastruktur secara fisik sampai dengan bentuk infrastruktur non fisik. Namun demikian dalam studi ini infrastruktur yang dibahas merupakan infrastruktur dalam bentuk fisik sedang infrastruktur dalam bentuk non fisik didefinisikan bukan sebagai infrastruktur namun sebagai kondisi situasional dan kontekstual.

Berdasarkan aspek kegiatan, infrastruktur didefinisikan terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial. Infrastruktur ekonomi adalah infrastruktur yang memberikan layanan secara langsung dalam bentuk fasilitas bagi berjalannya kegiatan ekonomi dengan lebih baik dan meningkatkan produktivitas dari aset yang ada. Infrastruktur ekonomi ini antara lain Infrastruktur transportasi,

komunikasi, listrik, irigasi, lembaga kredit, pasar desa untuk input dan output fasilitas pergudangan dan penyimpanan.

Infrastruktur sosial adalah Infrastruktur yang lebih berperan dalam menciptakan lingkungan berkegiatan manusia menjadi lebih baik, dan memfasilitasi terjadinya pembentukan modal sumber daya manusia yang lebih baik. Infrastruktur sosial ini antara lain: sekolah, fasilitas kesehatan, air bersih, sanitasi, dan pusat kegiatan budaya masyarakat. Pembangunan Infrastruktur transportasi, energi, listrik, irigasi, pasar dan pergudangan, komunikasi dan informasi memberikan peran strategis namun tidak langsung pada proses pembangunan ekonomi.

Pembangunan Infrastruktur transportasi di pedesaan secara langsung memberikan peran yang sangat penting dalam pertumbuhan wilayah desa, dimana peningkatan mobilitas dan produktivitas sumber daya. Infrastruktur transportasi menghemat waktu dan menurunkan biaya transportasi. Selain, pembangunan Infrastruktur transportasi di pedesaan memperkuat hubungan dengan kawasan ekonomi lain. Dampak lebih jauh bersama Infrastruktur irigasi adalah untuk merangsang pertanian untuk mengadopsi teknologi dan bibit baru dengan tereduksinya biaya input dan biaya pemasaran output. Selain itu juga akan meningkatkan kemungkinan tumbuhnya kegiatan di luar peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat.

Pembangunan Infrastruktur transportasi memberikan peran yang sangat penting dalam memperluas pasar bagi produk dan input pengurangan biaya pemasaran dari produk pertanian utamanya di daerah pedesaan. Hal ini pada giliran selanjutnya akan merangsang peningkatan keragaman komoditas. Proyek pembangunan irigasi disamping memberikan dampak berupa penambahan output pertanian juga menciptakan beberapa

eksternalitas dalam bentuk teraturnya pola air dan perbaikan terhadap penurunan kualitas lingkungan utamanya di daerah pedesaan.

D. Pemberdayaan Masyarakat

Sutoro Eko, 2002. Pemberdayaan berangkat dari asumsi hubungan yang setara antar semua elemen masyarakat dan negara. Pemberdayaan sangat percaya bahwa “kecil itu indah”, bahwa setiap orang itu mempunyai kearifan yang perlu dibangkitkan dan dihargai. Kalau konsep pembinaan cenderung mengabaikan prinsip kearifan semua orang itu. Dalam konteks pemberdayaan, semua unsur (pejabat, perangkat negara, wakil rakyat, para ahli, politisi, orpol, ormas, LSM, pengusaha, ulama, mahasiswa, serta rakyat banyak) berada dalam posisi setara, yang tumbuh bersama melalui proses belajar bersama-sama. Masing-masing elemen harus memahami dan menghargai kepentingan maupun perbedaan satu sama lain. Pemberdayaan tersebut dimaksudkan agar masing-masing unsur semakin meningkat kemampuannya, semakin kuat, semakin mandiri, serta memainkan perannya masing-masing tanpa mengganggu peran yang lain. Justru dengan pemberdayaan kemampuan dan peran yang berbeda-beda tersebut tidak diseragamkan, melainkan dihargai dan dikembangkan bersama-sama, sehingga bisa terjalin kerjasama yang baik. Oleh karena itu, dalam hal pemberdayaan, tidak dikenal unsur yang lebih kuat memberdayakan terhadap unsur yang lebih lemah untuk diberdayakan. Unsur-unsur yang lebih kuat hanya memainkan peran sebagai pembantu, pendamping atau fasilitator, yang memudahkan unsur-unsur yang lemah memberdayakan dirinya sendiri.

Konsep pemberdayaan masyarakat secara mendasar berarti menempatkan masyarakat beserta institusi-institusinya sebagai kekuatan dasar bagi pengembangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Menghidupkan kembali berbagai pranata ekonomi

masyarakat untuk dihimpun dan diperkuat sehingga dapat berperan sebagai lokomotif bagi kemajuan ekonomi merupakan keharusan untuk dilakukan. Ekonomi rakyat akan terbangun bila hubungan sinergis dari berbagai pranata sosial dan ekonomi yang ada didalam masyarakat dikembangkan kearah terbentuknya jaringan ekonomi rakyat. Dalam rangka mencari solusi masalah ekonomi dan politik serta budaya yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, semua pihak telah memberikan rambu-rambu untuk tidak terjebak membuat 'bungkus baru namun isi lama'.

Dari berbagai tawaran alternatif model pemberdayaan masyarakat, 'model ekonomi kerakyatan' secara teoritik telah berkembang menjadi wacana baru saat ini. Paradigma pemberdayaan ekonomi rakyat sebenarnya bukan saja berupa tuntutan atas pembagian secara adil aset ekonomi, tetapi juga merupakan keniscayaan ideologis dengan semangat meruntuhkan dominasi-dominasi birokrasi dalam mengatur dan menentukan berbagai bidang kehidupan rakyat. (Sasono, 1999). Untuk itu, maka pemberdayaan ekonomi rakyat (dalam penerapan untuk petani) berarti menuju kepada terbentuknya kemandirian petani yaitu berperilaku efisien, modern dan berdaya saing tinggi. Perilaku efisien artinya berpikir dan bertindak serta menggunakan sarana produksi secara tepat guna atau berdaya guna. Berperilaku modern artinya mengikuti dan terbuka terhadap perkembangan dan inovasi serta perubahan yang ada. Sedangkan berdaya saing tinggi yaitu mampu berpikir dan bertindak serta menggunakan sarana produksi atas dasar memperhatikan mutu hasil kerjanya dan kepuasan konsumen yang dilayaninya (Sumardjo, 1999). Beberapa pendekatan dan strategi dalam pemberdayaan masyarakat (Karsidi, 2001) menuju kemandirian petani khususnya untuk petani jagung, dapat ditempuh dengan berbagai upaya sebagai berikut :

- a. Memulai dengan tindakan mikro dan lokal. Proses pembelajaran rakyat harus dimulai dengan tindakan mikro dan lokal, namun memiliki konteks makro dan global.
- b. Pengembangan sektor ekonomi strategis sesuai dengan kondisi lokal (daerah). Karena masing-masing daerah potensinya berbeda, maka kebijakan yang akan diberlakukan juga berbeda antar daerah.
- c. Mengganti pendekatan kewilayahan administratif dengan pendekatan kawasan. Pemberdayaan masyarakat tidak mungkin didasarkan atas kewilayahan administratif.
- d. Membangun kembali kelembagaan masyarakat. Peranserta masyarakat menjadi keniscayaan bagi semua upaya pemberdayaan masyarakat, jika tidak dibarengi munculnya kelembagaan sosial, ekonomi dan budaya yang benar-benar diciptakan oleh masyarakat sendiri.
- e. Mengembangkan penguasaan pengetahuan teknis. Perlu dipahami bersama bahwa desakan modernisasi telah menggusur ilmu pengetahuan dan teknologi lokal dan menciptakan ketergantungan masyarakat lokal pada input luar serta hilangnya kepercayaan diri yang sangat serius.
- f. Pengembangan kesadaran pelaku ekonomi. Pemberdayaan yang diperlukan adalah tindakan berbasis pada kesadaran masyarakat untuk membebaskan diri dari belenggu kekuatan ekonomi dan politik yang menghambat proses demokratisasi ekonomi. Komitmen para petugas pemberdayaan masyarakat dan lembaga-lembaga terkait pada pengembangan kemandirian petani dan nelayan kecil merupakan sesuatu yang sangat diperlukan.

- g. Membangun jaringan ekonomi strategis. Jaringan strategis akan berfungsi untuk mengembangkan kerjasama dalam mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki kelompok ekonomi satu dengan lainnya baik dalam bidang produksi, pemasaran, teknologi dan permodalan.
- h. Kontrol kebijakan. Agar kebijakan pemerintah benar-benar mendukung upaya pemberdayaan masyarakat, maka kekuasaan pemerintah harus dikontrol. Sebagai contoh adalah keikutsertaan organisasi petani dalam proses pengambilan keputusan tentang kebijakan pertanian.

Beberapa aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam pemberdayaan masyarakat petani, antara lain :

- 1) Pengembangan organisasi/kelompok masyarakat yang dikembangkan dan berfungsi dalam mendinamisir kegiatan produktif masyarakat, misalnya berfungsinya HKTI, HNSI , dan organisasi lokal lainnya.
- 2) Pengembangan jaringan strategis antar kelompok/organisasi masyarakat yang terbentuk dan berperan dalam pengembangan masyarakat tani, misalnya asosiasi dari organisasi petani, baik dalam skala nasional, wilayah, maupun lokal.
- 3) Kemampuan kelompok petani kecil dalam mengakses sumber-sumber luar yang dapat mendukung pengembangan mereka, baik dalam bidang informasi pasar, permodalan, serta teknologi dan manajemen, termasuk didalamnya kemampuan lobi ekonomi. Di sinilah maka perlunya ekonomi jaringan dipembangkan. Ekonomi jaringan adalah suatu perekonomian yang menghimpun para pelaku ekonomi, baik dari produsen, konsumen, *service provider*, *equipment provider*, *cargo*, dan sebagainya di dalam jaringan yang terhubung baik secara elektronik maupun melalui berbagai forum usaha yang aktif dan dinamis. Ekonomi jaringan

ini harus didukung oleh jaringan telekomunikasi, jaringan pembiayaan, jaringan usaha dan perdagangan, jaringan advokasi usaha, jaringan saling belajar, serta jaringan lainnya seperti hasil temuan riset dan teknologi/inovasi baru, jaringan pasar, informasi kebijakan dan pendukung lainnya yang dapat diakses oleh semua dan tidak dimonopoli oleh kelompok tertentu (Sasono, 2000).

Pengembangan kemampuan-kemampuan teknis dan manajerial kelompok-kelompok masyarakat, sehingga berbagai masalah teknis dan organisasi dapat dipecahkan dengan baik. Di sini, selain masyarakat sasaran (petani jagung), juga para petugas penyuluh/pendamping pemberdayaan masyarakat harus meningkatkan kompetensi diri sebagai petugas yang mampu memberdayakan, karena banyak diantara mereka justru ketinggalan kemampuannya dengan kelompok sasarannya.

E. Strategi dan Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan

Secara konseptual menurut Suharto (2009:18), kemiskinan dapat disebabkan oleh empat faktor, yaitu:

- a) Faktor individual. Terkait dengan aspek patologis, termasuk kondisi fisik dan psikologis si miskin. Orang miskin disebabkan oleh perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin itu sendiri dalam menghadapi kehidupannya.
- b) Faktor sosial. Kondisi-kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin. Misalnya, diskriminasi berdasarkan usia, jender, etnis yang menyebabkan seseorang menjadi miskin. Termasuk dalam faktor ini adalah kondisi sosial dan ekonomi keluarga si miskin yang biasanya menyebabkan kemiskinan antar generasi.
- c) Faktor kultural. Kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan kemiskinan. Faktor ini secara khusus sering menunjukkan pada konsep "kemiskinan kultural"

atau "budaya kemiskinan" yang menghubungkan kemiskinan dengan kebiasaan hidup atau mentalitas. Sikap-sikap negatif seperti malas, fatalisme atau menyerah pada nasib, tidak memiliki jiwa wirausaha, dan kurang menghormati etos kerja, misalnya, sering ditemukan pada orang-orang miskin.

- d) Faktor struktural. Menunjuk pada struktur atau sistem yang tidak adil, tidak sensitif dan tidak *accessible* sehingga menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Sebagai contoh, sistem ekonomi neoliberalisme yang diterapkan di Indonesia telah menyebabkan para petani, nelayan, dan pekerja sektor informal terjerat oleh, dan sulit keluar dari kemiskinan. Sebaliknya, stimulus ekonomi, pajak dan iklim investasi lebih menguntungkan orang kaya dan pemodal asing untuk terus menumpuk kekayaannya.

Selanjutnya Kartasasmita (2004 : 7), menegaskan bahwa kemiskinan paling tidak disebabkan oleh empat faktor:

- a) Rendahnya taraf pendidikan. Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki.
- b) Rendahnya derajat kesehatan. Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir, dan rendahnya prakarsa.
- c) Terbatasnya lapangan kerja. Keadaan kemiskinan karena kondisi pendidikan diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan kerja atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan.
- d) Kondisi keterisolasian. Banyak penduduk miskin, secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga sulit atau tidak

dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan, dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya.

Sumodiningrat (1999:81), mendeskripsikan berbagai cara pengukuran kemiskinan dengan standar yang berbeda-beda, dengan tetap memperhatikan dua kategori tingkat kemiskinan, sebagai berikut:

- a) Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan;
- b) Kemiskinan relatif adalah penghitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan dalam suatu daerah. Kemiskinan jenis ini dikatakan relatif kerana berkaitan dengan distribusi pendapatan antar lapisan sosial.

Kemiskinan absolut di negara yang berkembang termasuk Indonesia menurut Izza Mafruhah (2009 : 37 – 38) sulit untuk dihilangkan, terutama disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- a) Laju pertumbuhan ekonomi secara makro yang lambat. Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang lambat, maka peluang kerja tidak bisa tumbuh dengan cepat sehingga penyerapan tenaga kerja juga lambat. Hal ini mempunyai konsekwensi kesempatan masyarakat untuk keluar dari kemiskinan juga sempit. Di banyak negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia, lambatnya pertumbuhan ini ditambah dengan keputusan politik yang lebih menguntungkan kelompok ekonomi kuat. Pertumbuhan ekonomi dengan sistem *trickle down effect* juga menyebabkan ketimpangan dalam masyarakat semakin tinggi.
- b) Pola pertumbuhan yang kurang bersahabat dengan masyarakat miskin. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah cenderung *urban biased*, kebijakan ini

kurang menguntungkan bagi petani dan masyarakat pedesaan yang masih kurang dalam menangkap kebijakan dengan alih teknologi.

- c) Kegagalan pemerintah dalam menciptakan peluang kerja. Dalam pembangunan pilihan efisiensi dengan mengandalkan padat modal melalui pemanfaatan mesin-mesin dengan teknologi tinggi secara nyata bertentangan dengan pemerataan kesempatan kerja yang seharusnya bersifat padat karya. Mekanisme pasar yang digagas untuk pertumbuhan ekonomi secara cepat ini sering tidak mampu menyediakan barang-barang publik yang merupakan kebutuhan dasar (*basic needs*) seperti pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar yang lain.

Pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat sangat relevan sebagai paradigma kebijakan desentralisasi dalam penanganan masalah sosial termasuk masalah kemiskinan. Pendekatan ini menyadari tentang betapa pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol internal atas sumber daya materi dan non material.

Selanjutnya Hikmat (2004:15-16) menyatakan bahwa : Ada tiga dasar untuk melakukan perubahan-perubahan struktural dan normatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, yaitu:

- a) Memusatkan pemikiran dan tindakan kebijakan pemerintah pada penciptaan keadaan-keadaan yang mendorong dan mendukung usaha-usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri, dan untuk memecahkan masalah-masalah mereka sendiri di tingkat individual, keluarga, dan komunitas,
- b) Mengembangkan struktur-struktur dan proses organisasi-organisasi yang berfungsi menurut kaidah-kaidah sistem organisasi,

c) Mengembangkan sistem-sistem produksi-konsumsi yang diorganisasi secara teritorial yang berlandaskan pada kaidah-kaidah pemilikan dan pengendalian lokal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo dan Universitas Negeri Gorontalo. Tempat pelaksanaan penelitian adalah di 5 (lima) Kabupaten se Provinsi Gorontalo, yaitu: 1) Kabupaten Gorontalo, 2) Kabupaten Boalemo, 3) Kabupaten Pohuwato, 4) Kabupaten Bone Bolango, dan 5) Kabupaten Gorontalo Utara..

Penelitian ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, yaitu mulai tanggal 19 Agustus sampai dengan 17 November 2019, yang kegiatannya terdiri dari: 1) Penyusunan proposal penelitian, 2) Penyusunan instrumen penelitian, 3) Pengumpulan data dan informasi penelitian, 4) Analisis data penelitian, 5) Pelaporan hasil penelitian.

B. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan gabungan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dengan analisis kuantitatif deskriptif dan kualitatif deskriptif. Berdasarkan permasalahan yang dikaji dengan metode deskriptif menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah sesuai kenyataan kehidupan ataupun rekayasa manusia. Dengan melalui observasi,, wawancara dan studi dokumenter akan diperoleh data dan informasi penelitian sesuai keadaan atau fakta riil di lapangan.

Kuantitatif Deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan tentang keadaan atau fakta riil di lapangan. Sedangkan kualitatif deskriptif menjelaskan atau menerangkan data dan informasi penelitian, yang merupakan pembuktian, memperkuat, memperdalam atau memperlemah data dan informasi penelitian yang diperoleh pada tahap kuantitatif deskriptif.

Pendekatan gabungan kuantitatif dan kualitatif sering disebut sebagai Sequential Explanatory. Creswell dalam Sugiono (2013) mengemukakan bahwa metode penelitian kombinasi model Sequential Explanatory dicirikan dengan pengumpulan data dan analisis kuantitatif pada tahap pertama, dan diikuti dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif pada tahap kedua guna memperkuat hasil penelitian yang dilakukan pada tahap pertama.

Unit analisis adalah 1). Tenaga Pendamping Profesional Desa dalam Pengelolaan Dana Desa 2). Pemerintah Desa, dan 3) Masyarakat Desa di 5 (lima) Kabupaten se Provinsi Gorontalo, yang terdiri dari Kabupaten Gorontalo, Boalemo, Pohuwato, Gorontalo Utara, dan Bone Bolango.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian berjumlah 408 orang, sedangkan Sampel penelitian berjumlah 200 orang yang persentasinya bervariasi. Selanjutnya Populasi dan Sampel penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1; POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN

NO	RESPONDEN/ INFORMAN	POPULASI / SAMPEL PENELITIAN					
		GORONTALO	BOALEMO	POHUWATO	GORUT	BONEBOL	PROVINSI
1	Tenaga Ahli Kabupaten	6 x 65% = 3	6 x 65% = 3	6 x 65% = 3	6 x 65% = 3	6 x 65% = 3	30 = 15
2	Tenaga Ahli Kecamatan	41X60%=14	18X60%=7	25X6%=9	21X60%=8	35X60%=12	140 = 50
3	Pendamping Lokal Desa	50X60%=20	21X60%=10	29X60=12	33X60%=15	45X60%=18	178 = 75
4	Pemerintah Desa	9	4	5	5	7	30
5	Masyarakat Desa	9	4	5	5	7	30
	Jumlah	55	28	34	36	47	200

Data Olahan Penelitian 2019

Selanjutnya penyebaran Sampel pada masing-masing Kabupaten tersebar pada 5 (lima) Status Desa, yang terdiri dari: Desa Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal, dan Sangat Tertinggal, seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.2; Responden/Informan Berdasarkan Status Desa

NO	KABUPATEN	JUMLAH SAMPEL BERDASARKAN STATUS DESA					JUMLAH DESA SAMPEL
		MANDIRI	MAJU	BERKEMBANG	TERTINGGAL	SANGAT TERTINGGAL	
1	GORONTALO	0%	60X1%=1	60X43% = 10	60X52%=14	60X4% = 2	27
2	BOALEMO	0%	26X2%=1	26X62% = 7	26X32% = 4	26X4 % = 1	13
3	POHUWATO	0%	36X7%=3	36X51% = 8	36X41%=6	36X1% = 0	17
4	GORUT	0%	40X2%=1	40X21% = 5	40X71%=10	40X7% = 3	19
5	BONEBOL	0%	54X1%=1	54X34% = 7	54X59%=13	54X6% = 3	24
	JUMLAH	0	7	37	47	9	100

Data Olahan Penelitian 2019

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari:

1. Angket

Teknik Angket digunakan untuk mendapatkan data dan informasi penelitian berupa: 1). Apakah jumlah Pendamping Desa sudah memadai jika dikaji dari Kondisi Geografis dan Variasi Kompleksitas permasalahan di Desa; 2). Apakah penyebaran Pendamping Desa sudah memadai jika dikaji dari kondisi Geografis Desa; 3) Apakah Kualifikasi pendidikan (tingkat pendidikan, bidang ilmu, dan Diklat Teknis) Pendamping Desa Menunjang dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya; dan 4) Apakah Gaji Pendamping Desa sudah Adil dan Cukup jika dikaji dari Kondisi Perekonomian dan Kondisi Geografis Desa.

2. Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan data dan informasi penelitian berupa: 1). Apakah jumlah Pendamping Desa sudah memadai jika dikaji dari Kondisi Geografis dan Variasi Kompleksitas permasalahan di Desa; 2). Apakah penyebaran Pendamping Desa sudah memadai jika dikaji dari kondisi Geografis Desa; 3) Apakah Kualifikasi pendidikan (tingkat pendidikan, bidang ilmu, dan Diklat Teknis) Pendamping Desa Menunjang dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya; dan 4) Apakah Gaji Pendamping Desa sudah Adil dan Cukup jika dikaji dari Kondisi Perekonomian dan Kondisi Geografis Desa.

3. Dokumentasi

Teknik Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data dan informasi penelitian berupa: 1) Deskripsi Umum Desa di wilayah Provinsi Gorontalo, berupa data pada Indeks Desa Membangun (IDM) dari keadaan pada tahun 2016 ke tahun 2019 dan 2) Kondisi Eksisting Tenaga Profesional Pendamping Desa dalam pengelolaan Dana Desa di Provinsi Gorontalo pada tahun 2019.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Seleksi dan Klasifikasi Data

Seleksi dan Klasifikasi Data penelitian digunakan untuk menganalisis sejauhmana angket yang terkumpul layak atau memenuhi syarat untuk diolah dan dianalisis sehingga dapat dilakukan pengolahan lebih lanjut. Setelah melewati tahap seleksi data selanjutnya mengklasifikasikan data berdasarkan indicator pada masing-masing variabel

2. Tabulasi dan Transkripsi

Kriteria penilaian digolongkan dalam lima tingkatan dengan penilaian sebagai berikut: Sangat Setuju, Setuju, Kurang Setuju, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju. Selanjutnya Bobot Skor dari alternatif jawaban dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3; Bobot Skor dan Alternatif Jawaban Angket

Bobot Skor	Alternatif Jawaban
5	Sangat Setuju
4	Setuju
3	Kurang Setuju
2	Tidak Setuju
1	Sangat Tidak Setuju

Data kualitatif yang kemudian diubah menjadi data kuantitatif, selanjutnya digunakan analisis statistik, yaitu dengan menggunakan rumus

statistik deskriptif untuk mendeskripsikan hasil penelitian dengan menggunakan

Rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{f}{N} \times 100 \%$$

Keterangan: P = Prosentase Jawaban

F = Frekuensi

N = Number of Cases (banyaknya Responden)

Pada tahapan kegiatan analisis ini dilakukan juga input data hasil wawancara ke dalam bentuk transkrip untuk mendukung langkah analisis data selanjutnya.

3. Pengolahan data melalui perhitungan dengan Weighted Means Score (WMS)

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah Weighted Means Score (WMS). Teknik ini digunakan untuk mendapatkan kecenderungan skor yang diberikan oleh responden pada setiap item pertanyaan.

Menurut Sudjana (2005) Teknik Weighted Means Score (WMS) adalah untuk menghitung kecenderungan jawaban respon terhadap variabel penelitian. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengolahan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemberiaan bobot nilai terhadap masing-masing alternatif jawaban yang diberikan oleh responden, sesuai dengan pertanyaan yang diberikan;
- b. Menghitung frekuensi dan alternatif jawaban responden pada setiap item pertanyaan;
- c. Mencari jumlah nilai jawaban yang menjadi pilihan responden disetiap pertanyaan, dengan menghitung frekuensi responden yang memilih alternatif jawaban yang diberikan tersebut selanjutnya dikalikan dengan bobot nilai alternatif itu sendiri;

- d. Menghitung nilai rata-rata pada setiap item pertanyaan pada angket, dengan menggunakan Rumus Weighted Means Score (WMS) sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudjana (2006 : 67) sebagai berikut:

$$X = \frac{\sum X_i}{N} \times 100 \%$$

Keterangan:

X = Skor rata-rata yang dicari

X_i = Jumlah skor gabungan (hasil perkalian frekuensi dengan bobot nilai untuk setiap alternatif jawaban)

N = Jumlah Responden)

- e. Menentukan variabel yang diukur berdasarkan indikator yang diteliti, maka digunakan skala penilaian oleh Riduwan (2010:15), yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.4; Kriteria Penilaian

Rentang Nilai	Kriteria
86 - 100 %	Sangat Sesuai/Sangat Setuju
71 - 85 %	Sesuai/Setuju
51 - 70 %	Kurang Sesuai/Kurang Setuju
35 - 50 %	Tidak Sesuai/Tidak Setuju
0 - 34 %	Sangat Tidak Sesuai/Sangat Tidak Setuju

Dari hasil analisis kuantitatif tersebut, selanjutnya untuk memperdalam keakuratan hasil penelitian secara kuantitatif, maka dilakukan wawancara dengan informan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Deskripsi Umum Desa di wilayah Provinsi Gorontalo;

Berdasarkan data pada Indeks Desa Membangun (IDM) telah terjadi peningkatan Status Desa di Provinsi Gorontalo secara signifikan dari keadaan pada tahun 2016 ke tahun 2019, yang digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Status Desa di Provinsi Gorontalo Tahun 2016

No	Kabupaten	STATUS DESA									
		Mandiri		Maju		Berkembang		Tertinggal		Sangat Tertinggal	
		Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1	Gorontalo	0	0	2	1	82	43	100	52	7	4
2	Boalemo	0	0	2	2	51	62	26	32	3	4
3	Pohuwato	0	0	7	7	52	51	41	41	1	1
4	Gorut	0	0	2	2	26	21	87	71	8	7
5	Bonebol	0	0	1	1	54	34	95	59	10	6
6	Provinsi	0	0	14	2.13	265	40.33	349	53.12	29	4.41

Data Olahan Penelitian 2019

Berdasarkan data pada tabel 4.1 di atas, dapat dideskripsikan bahwa prosentase Status Desa di wilayah Provinsi Gorontalo tahun 2016 adalah: Desa Mandiri 0%, Desa Maju 2.13%, Desa Berkembang 40.33%, Desa Tertinggal 53.12%, dan Desa Sangat Tertinggal 4.41%.

Selanjutnya Status Desa di Provinsi Gorontalo tahun 2019 digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Status Desa di Provinsi Gorontalo Tahun 2019

No	Kabupaten	STATUS DESA									
		Mandiri		Maju		Berkembang		Tertinggal		Sangat Tertinggal	
		Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1	Gorontalo	0	0	19	23.17	135	32.61	36	23.38	1	14.29
2	Boalemo	0	0	16	19.51	54	13.04	10	6.49	2	28.57
3	Pohuwato	0	0	15	18.29	52	12.56	34	22.08	0	0
4	Gorut	0	0	6	7.32	73	17.63	41	26.62	3	42.86
5	Bonebol	0	0	26	31.71	100	24.15	33	21.43	1	14.29
6	Provinsi	0	0	82	12.48	414	63.01	154	23.44	7	1.07

Data Olahan Penelitian 2019

Berdasarkan data pada tabel 4.2 di atas, dapat dideskripsikan bahwa prosentase Status Desa di wilayah Provinsi Gorontalo tahun 2019 adalah: Desa Mandiri 0%, Desa Maju 12.48%, Desa Berkembang 63.01%, Desa Tertinggal 23.44%, dan Desa Sangat Tertinggal 1.07%.

Selanjutnya Perbandingan Status Desa di Provinsi Gorontalo tahun 2016 dan 2019 digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Perbandingan Status Desa di Provinsi Gorontalo Tahun 2016 dan 2019

No	Kabupaten	STATUS DESA									
		Mandiri (%)		Maju (%)		Berkembang (%)		Tertinggal (%)		Sangat Tertinggal (%)	
		2016	2019	2016	2019	2016	2019	2016	2019	2016	2019
1	Gorontalo	0	0	1	23.17	43	32.61	52	23.38	4	14.29
2	Boalemo	0	0	2	19.51	62	13.04	32	6.49	4	28.57
3	Pohuwato	0	0	7	18.27	51	12.56	41	22.08	1	0
4	Gorut	0	0	2	7.32	21	17.63	71	26.62	7	42.86
5	Bonebol	0	0	1	31.71	34	24.15	59	21.43	6	14.29
6	Provinsi	0	0	14 (2.13)	82 (12.48)	265 (40.33)	414 (63.01)	349 (53.12)	154 (23.44)	29 (4.41)	7 (1.07)

Data Olahan Penelitian 2019

2. Kondisi Eksisting Tenaga Profesional Pendamping Desa;

Kondisi Eksisting Tenaga Profesional Pendamping Desa dalam pengelolaan Dana Desa di Provinsi Gorontalo pada tahun 2019 dapat digambarkan pada table berikut:

Tabel 4.4 Kondisi Eksisting Tenaga Profesional Pendamping Desa

No	Kabupaten	Tenaga Pendamping Profesional			Jumlah
		Tenaga Ahli Kab.	Tenaga Ahli Kec	Pendamping Lokal Desa	
1	Gorontalo	6	41	50	97
2	Boalemo	6	18	21	45
3	Pohuwato	6	25	29	60
4	Gorontalo Utara	6	21	33	60
5	Bone Bolango	6	35	45	86
6	Provinsi Gorontalo	30	140	178	348

3. Data dan Informasi tentang Pendamping Profesional Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Provinsi Gorontalo

3.1 Kesesuaian jumlah Pendamping Desa dikaji dari Kondisi Geografis dan Variasi Kompleksitas permasalahan di Desa;

Tabel 4.5 Jumlah Desa yang menjadi wilayah tanggung jawab sudah memadai dengan kemampuan fisik masing-masing Pendamping Desa

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi (f)	Skor Total	Prosentase (%)	Total Prosentase (%)
Sangat Setuju	5	30	150	20.18	743 ----- = 74.30% 1.000
Setuju	4	109	436	58.68	
Kurang Setuju	3	38	114	15.34	
Tidak Setuju	2	20	40	5.38	
Sangat Tidak Setuju	1	3	3	0.40	
Jumlah		200	743	100	

Data Olahan Penelitian 2019

Berdasarkan tabel 4.5 di atas tentang Jumlah Desa yang menjadi wilayah tanggung jawab sudah memadai dengan kemampuan fisik masing-masing Pendamping Desa menunjukkan bahwa terdapat 30 responden atau 20.18% yang menyatakan sangat setuju, 109 responden atau 58.68% yang menyatakan setuju, 38 responden atau 15.34% yang menyatakan kurang setuju, 20 responden atau 5.38% yang menyatakan tidak setuju, dan 3 responden atau 0.40% yang menyatakan sangat tidak setuju.

Dari hasil analisis skor data di atas, maka dapat diperoleh persentase skor pencapaian sebagai berikut:

$$\frac{743}{1.000} \times 100\% = 74.30\%$$

Selanjutnya angka 74.30% tersebut dikonsultasikan dengan Kriteria Penilaian, maka hasil tersebut dikategorikan pada kriteria **Sesuai**.

Tabel 4.6 Jumlah Pendamping Desa pada masing-masing Desa/Wilayah disesuaikan dengan kondisi geografis Desa

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi (f)	Skor Total	Prosentase (%)	Total Prosentase (%)
Sangat Setuju	5	88	440	52.57	837 ----- = 83.70% 1.000
Setuju	4	80	320	38.23	
Kurang Setuju	3	16	48	5.73	
Tidak Setuju	2	13	26	3.11	
Sangat Tidak Setuju	1	3	3	0.36	
Jumlah		200	837	100	

Data Olahan Penelitian 2019

Berdasarkan tabel 4.6 di atas tentang Jumlah Pendamping Desa pada masing-masing Desa/Wilayah disesuaikan dengan kondisi geografis Desa menunjukkan bahwa terdapat 88 responden atau 52.57% yang menyatakan sangat setuju, 80 responden atau 38.23% yang menyatakan setuju, 16 responden atau 5.73% yang menyatakan kurang setuju, 13 responden atau 3.11% yang menyatakan tidak setuju, dan 3 responden atau 0.36% yang menyatakan sangat tidak setuju.

Dari hasil analisis skor data di atas, maka dapat diperoleh persentase skor pencapaian sebagai berikut:

$$\frac{837}{1.000} \times 100\% = 83.70\%$$

Selanjutnya angka 83.70% tersebut dikonsultasikan dengan Kriteria Penilaian, maka hasil tersebut dikategorikan pada kriteria **Sesuai**.

Tabel 4.7 Jumlah Pendamping Desa pada masing-masing Desa/Wilayah disesuaikan dengan kompleksitas permasalahan di Desa

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi (f)	Skor Total	Prosentase (%)	Total Prosentase (%)
Sangat Setuju	5	55	275	34.81	790 ----- = 79% 1.000
Setuju	4	95	380	48.10	
Kurang Setuju	3	37	111	14.05	
Tidak Setuju	2	11	22	2.78	
Sangat Tidak Setuju	1	2	2	0.25	
Jumlah		200	790	100	

Data Olahan Penelitian 2019

Berdasarkan tabel 4.7 di atas tentang Jumlah Pendamping Desa pada masing-masing Desa/Wilayah disesuaikan dengan kompleksitas permasalahan di Desa menunjukkan bahwa terdapat 55 responden atau 34.81% yang menyatakan sangat setuju, 95 responden atau 48.10% yang menyatakan setuju, 37 responden atau 14.05% yang menyatakan kurang setuju, 11 responden atau 2.78% yang menyatakan tidak setuju, dan 2 responden atau 0.25% yang menyatakan sangat tidak setuju.

Dari hasil analisis skor data di atas, maka dapat diperoleh persentase skor pencapaian sebagai berikut:

$$\frac{790}{1.000} \times 100\% = 79\%$$

Selanjutnya angka 79% tersebut dikonsultasikan dengan Kriteria Penilaian, maka hasil tersebut dikategorikan pada kriteria **Sesuai**.

Tabel 4.8 Jumlah Desa yang menjadi wilayah tanggung jawab masing-masing Pendamping Desa adalah gabungan dari berbagai Status Desa yang terdiri dari Desa Maju, Berkembang, Tertinggal, dan Sangat Tertinggal

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi (f)	Skor Total	Prosentase (%)	Total Prosentase (%)
Sangat Setuju	5	66	330	40.94	806 ----- = 80.60% 1.000
Setuju	4	91	364	45.16	
Kurang Setuju	3	28	84	10.42	
Tidak Setuju	2	13	26	3.23	
Sangat Tidak Setuju	1	2	2	0.25	
Jumlah		200	806		

Data Olahan Penelitian 2019

Berdasarkan tabel 4.8 di atas tentang Jumlah Desa yang menjadi wilayah tanggung jawab masing-masing Pendamping Desa adalah gabungan dari berbagai Status Desa yang terdiri dari Desa Maju, Berkembang, Tertinggal, dan Sangat Tertinggal menunjukkan bahwa terdapat 66 responden atau 40.94% yang menyatakan sangat setuju, 91 responden atau 45.16% yang menyatakan setuju, 28 responden atau 10.42% yang menyatakan kurang setuju, 13 responden atau 3.23% yang menyatakan tidak setuju, 2 responden atau 0.25% yang menyatakan sangat tidak setuju.

Dari hasil analisis skor data di atas, maka dapat diperoleh persentase skor pencapaian sebagai berikut:

$$\frac{806}{1.000} \times 100\% = 80.60\%$$

Selanjutnya angka 80.60% tersebut dikonsultasikan dengan Kriteria Penilaian, maka hasil tersebut dikategorikan pada kriteria **Sesuai**.

Tabel 4.9 Jumlah Desa yang menjadi wilayah tanggung jawab masing-masing Pendamping Desa disesuaikan dengan kondisi geografis Desa dan kompleksitas permasalahan di Desa

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi (f)	Skor Total	Prosentase (%)	Total Prosentase (%)
Sangat Setuju	5	64	320	39.56	809 ----- = 80.90% 1.000
Setuju	4	93	372	45.98	
Kurang Setuju	3	31	93	11.50	
Tidak Setuju	2	12	24	2.97	
Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0	
Jumlah		200	809		

Data Olahan Penelitian 2019

Berdasarkan tabel 4.9 di atas tentang Jumlah Desa yang menjadi wilayah tanggung jawab masing-masing Pendamping Desa disesuaikan dengan kondisi geografis Desa dan kompleksitas permasalahan di Desa menunjukkan bahwa terdapat 64 responden atau 39.56% yang menyatakan sangat setuju, 93 responden atau 45.98% yang menyatakan setuju, 31 responden atau 11.50% yang menyatakan kurang setuju, 12 responden atau 2.97% yang menyatakan tidak setuju, dan tidak ada responden atau 0% yang menyatakan sangat tidak setuju.

Dari hasil analisis skor data di atas, maka dapat diperoleh persentase skor pencapaian sebagai berikut:

$$\frac{809}{1.000} \times 100\% = 80.90\%$$

Selanjutnya angka 80.90% tersebut dikonsultasikan dengan Kriteria Penilaian, maka hasil tersebut dikategorikan pada kriteria **Sesuai**.

Sebagai kesimpulan umum dari Kesesuaian jumlah Pendamping Desa dikaji dari Kondisi Geografis dan Variasi Kompleksitas permasalahan di Desa dapat dilihat pada tabel Akumulasi berikut:

Tabel 4.10 Hasil akumulasi

Rumusan Masalah	Tabel	Bobot Skor										Total Prosentase (%)
		5		4		3		2		1		
		F	X	F	X	F	X	F	X	F	X	
Pertama (3.1)	4.5	30	150	109	436	38	114	20	40	3	3	3.989 ----- = 79.78% 5.000
	4.6	88	440	80	320	16	48	13	26	3	3	
	4.7	55	275	95	380	37	111	11	22	2	2	
	4.8	66	330	92	368	28	84	13	26	2	2	
	4.9	64	320	93	372	31	93	12	24	0	0	
Jumlah		303	1515	469	1878	150	450	69	138	10	10	
Skor Total		3.989										

Data Olahan Penelitian 2019

Keterangan:

F = Frekuensi responden yang menjawab sesuai dengan kategori jawaban

X = Frekuensi dikalikan dengan Bobot nilai kategori jawaban.

Berdasarkan tabel 4.10 di atas maka dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata persentase Variabel Kesesuaian jumlah Pendamping Desa dikaji dari Kondisi Geografis dan Variasi Kompleksitas permasalahan di Desa adalah **79.78%**, yang berarti termasuk pada Kategori **Sesuai (71-85%)**

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Informan diperoleh informasi bahwa: Kesesuaian jumlah Pendamping Desa yang dikaji dari kondisi geografis dan kompleksitas permasalahan di Desa Sudah Sesuai, namun dengan catatan bahwa ada faktor yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu: Jumlah Desa yang menjadi wilayah tanggung jawab sudah memadai dengan kemampuan fisik masing-masing Pendamping Desa

dan Jumlah Pendamping Desa pada masing-masing Desa/Wilayah disesuaikan dengan kompleksitas permasalahan di Desa.

3.2 Kesesuaian penyebaran Pendamping Desa dengan kondisi Geografis Desa;

Tabel 4.11 Penyebaran Pendamping Desa pada masing-masing Desa/Wilayah bervariasi sesuai kondisi geografis Desa

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi (f)	Skor Total	Prosentase (%)	Total Prosentase (%)
Sangat Setuju	5	50	250	30.75	813 ----- = 81.30% 1.000
Setuju	4	119	476	58.55	
Kurang Setuju	3	24	72	8.86	
Tidak Setuju	2	7	14	1.72	
Sangat Tidak Setuju	1	1	1	0.12	
Jumlah		200	813	100	

Data Olahan Penelitian 2019

Berdasarkan tabel 4.11 di atas tentang Penyebaran Pendamping Desa pada masing-masing Desa/Wilayah bervariasi sesuai kondisi geografis Desa menunjukkan bahwa terdapat 50 responden atau 30.75% yang menyatakan sangat setuju, 119 responden atau 58.55% yang menyatakan setuju, 24 responden atau 8.86% yang menyatakan kurang setuju, 7 responden atau 1.72% yang menyatakan tidak setuju, dan 1 responden atau 0.12% yang menyatakan sangat tidak setuju.

Dari hasil analisis skor data di atas, maka dapat diperoleh persentase skor pencapaian sebagai berikut:

$$\frac{813}{1.000} \times 100\% = 81.30\%$$

Selanjutnya angka 81.30% tersebut dikonsultasikan dengan Kriteria Penilaian, maka hasil tersebut dikategorikan pada kriteria **Sesuai**.

Tabel 4.12 Penyebaran Pendamping Desa pada masing-masing Desa/Wilayah bervariasi sesuai Variasi Kompleksitas permasalahan di Desa

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi (f)	Skor Total	Prosentase (%)	Total Prosentase (%)
Sangat Setuju	5	37	185	24.63	751 ----- = 75.10% 1.000
Setuju	4	103	412	54.86	
Kurang Setuju	3	43	129	17.18	
Tidak Setuju	2	12	24	3.20	
Sangat Tidak Setuju	1	1	1	0.13	
Jumlah		200	751	100	

Data Olahan Penelitian 2019

Berdasarkan tabel 4.12 di atas tentang **Penyebaran Pendamping Desa pada masing-masing Desa/Wilayah bervariasi sesuai Variasi Kompleksitas permasalahan di Desa** menunjukkan bahwa terdapat 37 responden atau 24.63% yang menyatakan sangat setuju, 103 responden atau 54.86% yang menyatakan setuju, 43 responden atau 17.18% yang menyatakan kurang setuju, 12 responden atau 3.20% yang menyatakan tidak setuju, dan 1 responden atau 0.13% yang menyatakan sangat tidak setuju.

Dari hasil analisis skor data di atas, maka dapat diperoleh persentase skor pencapaian sebagai berikut:

$$\frac{751}{1.000} \times 100\% = 75.10\%$$

Selanjutnya angka 75.10% tersebut dikonsultasikan dengan Kriteria Penilaian, maka hasil tersebut dikategorikan pada kriteria **Sesuai**.

Tabel 4.13 Penyebaran Pendamping Desa pada masing-masing Desa/Wilayah merata berdasarkan Status Desa yang terdiri dari Desa Maju, Berkembang, Tertinggal, dan Sangat Tertinggal

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi (f)	Skor Total	Prosentase (%)	Total Prosentase (%)
Sangat Setuju	5	54	270	34.48	783 ----- = 78.30% 1.000
Setuju	4	92	368	47	
Kurang Setuju	3	38	114	14.56	
Tidak Setuju	2	15	30	3.83	
Sangat Tidak Setuju	1	1	1	0.13	
Jumlah		200	783	100	

Data Olahan Penelitian 2019

Berdasarkan tabel 4.13 di atas tentang **Penyebaran Pendamping Desa pada masing-masing Desa/Wilayah merata berdasarkan Status Desa yang terdiri dari Desa Maju, Berkembang, Tertinggal, dan Sangat Tertinggal** menunjukkan bahwa terdapat 54 responden atau 34.48% yang menyatakan sangat setuju, 92 responden atau 47% yang menyatakan setuju, 38 responden atau 14.56% yang menyatakan kurang setuju, 15 responden atau 3.83% yang menyatakan tidak setuju, dan 1 responden atau 0.13% yang menyatakan sangat tidak setuju.

Dari hasil analisis skor data di atas, maka dapat diperoleh persentase skor pencapaian sebagai berikut:

$$\frac{783}{1.000} \times 100\% = 78.30\%$$

Selanjutnya angka 78.30% tersebut dikonsultasikan dengan Kriteria Penilaian, maka hasil tersebut dikategorikan pada kriteria **Sesuai**.

Tabel 4.14 Penyebaran Pendamping Desa pada masing-masing Desa/Wilayah sudah disesuaikan dengan kemampuan fisik masing-masing Pendamping Desa

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi (f)	Skor Total	Prosentase (%)	Total Prosentase (%)
Sangat Setuju	5	34	170	22.67	750 ----- = 75% 1.000
Setuju	4	105	420	56	
Kurang Setuju	3	41	123	16.40	
Tidak Setuju	2	17	34	4.53	
Sangat Tidak Setuju	1	3	3	0.40	
Jumlah		200	750	100	

Data Olahan Penelitian 2019

Berdasarkan tabel 4.14 di atas tentang **Penyebaran Pendamping Desa pada masing-masing Desa/Wilayah sudah disesuaikan dengan kemampuan fisik masing-masing Pendamping Desa** menunjukkan bahwa terdapat 34 responden atau 22.67% yang menyatakan sangat setuju, 105 responden atau 56% yang menyatakan setuju, 41 responden atau 16.40% yang menyatakan kurang setuju, 17 responden atau 4.53% yang menyatakan tidak setuju, dan 3 responden atau 0.40% yang menyatakan sangat tidak setuju.

Dari hasil analisis skor data di atas, maka dapat diperoleh persentase skor pencapaian sebagai berikut:

$$\frac{750}{1.000} \times 100\% = 75\%$$

Selanjutnya angka 75% tersebut dikonsultasikan dengan Kriteria Penilaian, maka hasil tersebut dikategorikan pada kriteria **Sesuai**.

Tabel 4.15 Penyebaran Pendamping Desa pada masing-masing Desa/Wilayah bervariasi sesuai kondisi geografis Desa dan Variasi Kompleksitas permasalahan di Desa

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi (f)	Skor Total	Prosentase (%)	Total Prosentase (%)
Sangat Setuju	5	39	195	25.32	770 ----- = 77% 1.000
Setuju	4	109	436	56.62	
Kurang Setuju	3	37	111	14.42	
Tidak Setuju	2	13	26	3.38	
Sangat Tidak Setuju	1	2	2	0.26	
Jumlah		200	770	100	

Data Olahan Penelitian 2019

Berdasarkan tabel 4.15 di atas tentang **Penyebaran Pendamping Desa pada masing-masing Desa/Wilayah bervariasi sesuai kondisi geografis Desa dan Variasi Kompleksitas permasalahan di Desa** menunjukkan bahwa terdapat 39 responden atau 25.32% yang menyatakan sangat setuju, 109 responden atau 56.62% yang menyatakan setuju, 37 responden atau 14.42% yang menyatakan kurang setuju, 13 responden atau 3.38% yang menyatakan tidak setuju, dan 2 responden atau 0.26% yang menyatakan sangat tidak setuju.

Dari hasil analisis skor data di atas, maka dapat diperoleh persentase skor pencapaian sebagai berikut:

$$\frac{770}{1.000} \times 100\% = 77\%$$

Selanjutnya angka 77% tersebut dikonsultasikan dengan Kriteria Penilaian, maka hasil tersebut dikategorikan pada kriteria **Sesuai**.

Sebagai kesimpulan umum dari Kesesuaian jumlah Pendamping Desa dikaji dari kesesuaian penyebaran Pendamping Desa dengan kondisi geografis Desa dapat dilihat pada tabel Akumulasi berikut:

Tabel 4.16 Rekapitulasi

Rumusan Masalah	Tabel	Bobot Skor										Total Prosentase (%)
		5		4		3		2		1		
		F	X	F	X	F	X	F	X	F	X	
Kedua (3.2)	4.11	50	250	119	476	24	72	7	40	1	1	3.867 ----- = 77.34% 5.000
	4.12	37	185	103	412	43	129	13	26	1	1	
	4.13	54	270	92	368	38	114	15	22	1	1	
	4.14	34	170	105	420	41	123	17	26	3	3	
	4.15	39	195	109	436	37	111	13	24	2	2	
Jumlah		214	1070	528	2112	183	549	64	138	8	8	
Skor Total		3.867										

Data Olahan Penelitian 2019

Keterangan:

F = Frekuensi responden yang menjawab sesuai dengan kategori jawaban

X = Frekuensi dikalikan dengan Bobot nilai kategori jawaban.

Berdasarkan tabel 4.16 di atas maka dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata persentase Indikator Kesesuaian jumlah Pendamping Desa dikaji dari Kondisi Geografis dan Variasi Kompleksitas permasalahan di Desa adalah **77.34%**, yang berarti termasuk pada Kategori **Sesuai (71-85%)**.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Informan diperoleh informasi bahwa: Kesesuaian jumlah Pendamping Desa dikaji dari Kondisi Geografis dan Variasi Kompleksitas permasalahan di Desa Sudah Sesuai, namun dengan catatan bahwa ada faktor yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu: Penyebaran Pendamping Desa pada masing-masing Desa/Wilayah bervariasi sesuai Variasi Kompleksitas permasalahan di Desa, Penyebaran Pendamping Desa pada masing-masing Desa/Wilayah

merata berdasarkan Status Desa yang terdiri dari Desa Maju, Berkembang, Tertinggal, dan Sangat Tertinggal, Penyebaran Pendamping Desa pada masing-masing Desa/Wilayah sudah disesuaikan dengan kemampuan fisik masing-masing Pendamping Desa, dan Penyebaran Pendamping Desa pada masing-masing Desa/Wilayah bervariasi sesuai kondisi geografis Desa dan Variasi Kompleksitas permasalahan di Desa.

3.3 Dukungan Kualifikasi pendidikan (tingkat pendidikan, bidang ilmu, dan Diklat Teknis) Pendamping Desa dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya;

Tabel 4.17 Tingkat pendidikan Pendamping Desa menunjang dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai Pendamping Desa

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi (f)	Skor Total	Prosentase (%)	Total Prosentase (%)
Sangat Setuju	5	79	395	46.58	848 ----- = 84.80% 1.000
Setuju	4	99	396	46.70	
Kurang Setuju	3	15	45	5.31	
Tidak Setuju	2	5	10	1.18	
Sangat Tidak Setuju	1	2	2	0.24	
Jumlah		200	848	100	

Data Olahan Penelitian 2019

Berdasarkan tabel 4.17 di atas tentang **Tingkat pendidikan Pendamping Desa menunjang dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai Pendamping Desa**, menunjukkan bahwa terdapat 79 responden atau 46.58% yang menyatakan sangat setuju, 99 responden atau 46.70% yang menyatakan setuju, 15 responden atau 5.31% yang menyatakan kurang setuju, 5 responden atau 1.18% yang menyatakan tidak setuju, dan 2 responden atau 0.24% yang menyatakan sangat tidak setuju.

Dari hasil analisis skor data di atas, maka dapat diperoleh persentase skor pencapaian sebagai berikut:

$$\frac{848}{1.000} \times 100\% = 84.80\%$$

Selanjutnya angka 84.80% tersebut dikonsultasikan dengan Kriteria Penilaian, maka hasil tersebut dikategorikan pada kriteria **Sesuai**.

Tabel 4.18 Tingkat pendidikan Pendamping Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Desa

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi (f)	Skor Total	Prosentase (%)	Total Prosentase (%)
Sangat Setuju	5	68	340	40.77	834 ----- = 83.40% 1.000
Setuju	4	110	440	52.76	
Kurang Setuju	3	14	42	5.04	
Tidak Setuju	2	5	10	1.20	
Sangat Tidak Setuju	1	2	2	0.24	
Jumlah		200	834	100	

Data Olahan Penelitian 2019

Berdasarkan tabel 4.18 di atas tentang **Tingkat pendidikan Pendamping Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Desa** menunjukkan bahwa terdapat 68 responden atau 40.77% yang menyatakan sangat setuju, 110 responden atau 52.76% yang menyatakan setuju, 14 responden atau 5.04% yang menyatakan kurang setuju, 5 responden atau 1.20% yang menyatakan tidak setuju, dan 2 responden atau 0.24% yang menyatakan sangat tidak setuju.

Dari hasil analisis skor data di atas, maka dapat diperoleh persentase skor pencapaian sebagai berikut:

$$\frac{834}{1.000} \times 100\% = 83.40\%$$

Selanjutnya angka 83.40% tersebut dikonsultasikan dengan Kriteria Penilaian, maka hasil tersebut dikategorikan pada kriteria **Sesuai**.

Tabel 4.19 Bidang Keilmuan atau Program Studi Pendamping Desa menunjang dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai Pendamping Desa

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi (f)	Skor Total	Prosentase (%)	Total Prosentase (%)
Sangat Setuju	5	53	265	32.64	812 ----- = 81.20% 1.000
Setuju	4	115	460	56.65	
Kurang Setuju	3	25	75	9.24	
Tidak Setuju	2	5	10	1.23	
Sangat Tidak Setuju	1	2	2	0.25	
Jumlah		200	812		

Data Olahan Penelitian 2019

Berdasarkan tabel 4.19 di atas tentang **Bidang Keilmuan atau Program Studi Pendamping Desa menunjang dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai Pendamping Desa** menunjukkan bahwa terdapat 53 responden atau 32.64% yang menyatakan sangat setuju, 115 responden atau 56.65% yang menyatakan setuju, 25 responden atau 9.24% yang menyatakan kurang setuju, 5 responden atau 1.23% yang menyatakan tidak setuju, dan 2 responden atau 0.25% yang menyatakan sangat tidak setuju.

Dari hasil analisis skor data di atas, maka dapat diperoleh persentase skor pencapaian sebagai berikut:

$$\frac{812}{1.000} \times 100\% = 81.20\%$$

Selanjutnya angka 81.20% tersebut dikonsultasikan dengan Kriteria Penilaian, maka hasil tersebut dikategorikan pada kriteria **Sesuai**.

Tabel 4.20 Bidang Keilmuan atau Program Studi Pendamping Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Desa

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi (f)	Skor Total	Prosentase (%)	Total Prosentase (%)
Sangat Setuju	5	51	255	33.16	769 ----- = 76.90% 1.000
Setuju	4	108	432	56.18	
Kurang Setuju	3	22	66	8.58	
Tidak Setuju	2	7	14	1.82	
Sangat Tidak Setuju	1	2	2	0.26	
Jumlah		200	769	100	

Data Olahan Penelitian 2019

Berdasarkan tabel 4.20 di atas tentang **Bidang Keilmuan atau Program Studi Pendamping Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Desa** menunjukkan bahwa terdapat 51 responden atau 33.16% yang menyatakan sangat setuju, 108 responden atau 56.18% yang menyatakan setuju, 22 responden atau 8.58% yang menyatakan kurang setuju, 7 responden atau 1.82% yang menyatakan tidak setuju, dan 2 responden atau 0.26% yang menyatakan sangat tidak setuju.

Dari hasil analisis skor data di atas, maka dapat diperoleh persentase skor pencapaian sebagai berikut:

$$\frac{769}{1.000} \times 100\% = 76.90\%$$

Selanjutnya angka 76.90% tersebut dikonsultasikan dengan Kriteria Penilaian, maka hasil tersebut dikategorikan pada kriteria **Sesuai**.

Tabel 4.21 Keikutsertaan Pendamping Desa pada Diklat Teknis menunjang dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai Pendamping Desa

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi (f)	Skor Total	Prosentase (%)	Total Prosentase (%)
Sangat Setuju	5	100	500	56.88	879 ----- = 87.90% 1.000
Setuju	4	88	352	40.06	
Kurang Setuju	3	6	18	2.05	
Tidak Setuju	2	3	6	0.68	
Sangat Tidak Setuju	1	3	3	0.34	
Jumlah		200	879	100	

Data Olahan Penelitian 2018

Berdasarkan tabel 4.21 di atas tentang **Keikutsertaan Pendamping Desa pada Diklat Teknis menunjang dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai Pendamping Desa** menunjukkan bahwa terdapat 100 responden atau 56.88% yang menyatakan sangat setuju, 88 responden atau 40.06% yang menyatakan setuju, 6 responden atau 2.05% yang menyatakan kurang setuju, 3 responden atau 0.68% yang menyatakan tidak setuju, dan 3 responden atau 0.34% yang menyatakan sangat tidak setuju.

Dari hasil analisis skor data di atas, maka dapat diperoleh persentase skor pencapaian sebagai berikut:

$$\frac{879}{1.000} \times 100\% = 87.90\%$$

Selanjutnya angka 87.90% tersebut dikonsultasikan dengan Kriteria Penilaian, maka hasil tersebut dikategorikan pada kriteria **Sangat Sesuai**.

Sebagai kesimpulan umum dari dukungan kualifikasi pendidikan (tingkat pendidikan, bidang ilmu, dan diklat teknis) Pendamping Desa dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dapat dilihat pada tabel Akumulasi berikut:

Tabel 4.22 Rekapitulasi

Rumusan Masalah	Tabel	Bobot Skor										Total Prosentase (%)
		5		4		3		2		1		
		F	X	F	X	F	X	F	X	F	X	
Ketiga (3.3)	4.17	79	395	99	396	15	45	5	10	2	2	4.142 ----- = 82.84% 5.000
	4.18	68	340	110	440	14	42	5	10	2	2	
	4.19	53	265	115	460	25	75	5	10	2	2	
	4.20	51	255	108	432	22	66	7	14	2	2	
	4.21	100	500	88	352	6	18	3	6	3	3	
Jumlah		351	1755	520	2080	82	246	25	50	11	11	
Skor Total		4.142										

Data Olahan Penelitian 2019

Keterangan:

F = Frekuensi responden yang menjawab sesuai dengan kategori jawaban

X = Frekuensi dikalikan dengan Bobot nilai kategori jawaban.

Berdasarkan tabel 4.22 di atas maka dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata persentase Indikator dukungan kualifikasi pendidikan (tingkat pendidikan, bidang ilmu, dan diklat teknis) Pendamping Desa dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah **82.84%**, yang berarti termasuk pada Kategori **Sesuai (71 – 85%)**.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Informan diperoleh informasi bahwa: Kualifikasi pendidikan (Tingkat pendidikan, Bidang ilmu, dan Diklat Teknis) pendamping desa menunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Sudah Sesuai, namun dengan catatan bahwa ada faktor yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu: Bidang Keilmuan atau Program Studi Pendamping Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Desa.

3.4 Gaji Pendamping Desa berdasarkan Kondisi Perekonomian dan Kondisi Geografis Desa;

Tabel 4.23 Besaran gaji bulanan dan tunjangan lainnya yang akan diterima oleh Pendamping Desa sudah disampaikan sebelum pelaksanaan program pendampingan Desa

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi (f)	Skor Total	Prosentase (%)	Total Prosentase (%)
Sangat Setuju	5	54	270	34.05	793 ----- = 79.30% 1.000
Setuju	4	105	420	52.96	
Kurang Setuju	3	26	78	9.84	
Tidak Setuju	2	11	22	2.77	
Sangat Tidak Setuju	1	3	3	0.38	
Jumlah		200	793	100	

Data Olahan Penelitian 2019

Berdasarkan tabel 4.23 di atas tentang **Besaran gaji bulanan dan tunjangan lainnya yang akan diterima oleh Pendamping Desa sudah disampaikan sebelum pelaksanaan program pendampingan Desa** menunjukkan bahwa terdapat 54 responden atau 34.05% yang menyatakan sangat setuju, 105 responden atau 52.96% yang menyatakan setuju, 26 responden atau 9.84% yang menyatakan kurang setuju, 11 responden atau 2.77% yang menyatakan tidak setuju, dan 3 responden atau 0.38% yang menyatakan sangat tidak setuju.

Dari hasil analisis skor data di atas, maka dapat diperoleh persentase skor pencapaian sebagai berikut:

$$\frac{793}{1.000} \times 100\% = 79.30\%$$

Selanjutnya angka 79.30% tersebut dikonsultasikan dengan Kriteria Penilaian, maka hasil tersebut dikategorikan pada kriteria **Sesuai**.

Tabel 4.24 Tidak ada kecemburuan dikalangan Pendamping Desa dalam hal besaran gaji bulanan dan tunjangan lainnya yang diterima oleh masing-masing Pendamping Desa sekalipun kondisi geografis desa bervariasi

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi (f)	Skor Total	Prosentase (%)	Total Prosentase (%)
Sangat Setuju	5	28	140	21.37	655 ----- = 65.50% 1.000
Setuju	4	72	288	43.97	
Kurang Setuju	3	48	144	21.98	
Tidak Setuju	2	31	62	9.47	
Sangat Tidak Setuju	1	21	21	3.21	
Jumlah		200	655	100	

Data Olahan Penelitian 2019

Berdasarkan tabel 4.24 di atas tentang **Tidak ada kecemburuan dikalangan Pendamping Desa dalam hal besaran gaji bulanan dan tunjangan lainnya yang diterima oleh masing-masing Pendamping Desa sekalipun kondisi geografis desa bervariasi** menunjukkan bahwa terdapat 28 responden atau 21.37% yang menyatakan sangat setuju, 72 responden atau 43.97% yang menyatakan setuju, 48 responden atau 21.98% yang menyatakan kurang setuju, 31 responden atau 9.47% yang menyatakan tidak setuju, dan 21 responden atau 3.21% yang menyatakan sangat tidak setuju.

Dari hasil analisis skor data di atas, maka dapat diperoleh persentase skor pencapaian sebagai berikut:

$$\frac{655}{1.000} \times 100\% = 65.50\%$$

Selanjutnya angka 65.50% tersebut dikonsultasikan dengan Kriteria Penilaian, maka hasil tersebut dikategorikan pada kriteria **Kurang Sesuai**.

Tabel 4.25 Besaran gaji bulanan dan tunjangan lainnya yang diterima oleh Pendamping Desa sesuai dengan kebutuhan minimal Pendamping Desa di wilayahnya masing-masing

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi (f)	Skor Total	Prosentase (%)	Total Prosentase (%)
Sangat Setuju	5	25	125	20.83	600 ----- = 60% 1.000
Setuju	4	62	248	41.33	
Kurang Setuju	3	44	132	22	
Tidak Setuju	2	36	72	12	
Sangat Tidak Setuju	1	23	23	3.83	
Jumlah		200	600	100	

Data Olahan Penelitian 2019

Berdasarkan tabel 4.25 di atas tentang **Besaran gaji bulanan dan tunjangan lainnya yang diterima oleh Pendamping Desa sesuai dengan kebutuhan minimal Pendamping Desa di wilayahnya masing-masing** menunjukkan bahwa terdapat 25 responden atau 20.83% yang menyatakan sangat setuju, 62 responden atau 41.33% yang menyatakan setuju, 44 responden atau 22% yang menyatakan kurang setuju, 36 responden atau 12% yang menyatakan tidak setuju, dan 23 responden atau 3.83% yang menyatakan sangat tidak setuju.

Dari hasil analisis skor data di atas, maka dapat diperoleh persentase skor pencapaian sebagai berikut:

$$\frac{600}{1.000} \times 100\% = 60\%$$

Selanjutnya angka 60% tersebut dikonsultasikan dengan Kriteria Penilaian, maka hasil tersebut dikategorikan pada kriteria **Kurang Sesuai**.

Tabel 4.26 Besaran gaji bulanan dan tunjangan lainnya yang diterima oleh Pendamping Desa sesuai dengan Upah Minimum Regional Provinsi

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi (f)	Skor Total	Prosentase (%)	Total Prosentase (%)
Sangat Setuju	5	30	150	20.55	730 ----- = 73% 1.000
Setuju	4	98	392	53.70	
Kurang Setuju	3	34	102	13.97	
Tidak Setuju	2	38	76	10.41	
Sangat Tidak Setuju	1	10	10	1.37	
Jumlah		200	730	100	

Data Olahan Penelitian 2019

Berdasarkan tabel 4.26 di atas tentang **Besaran gaji bulanan dan tunjangan lainnya yang diterima oleh Pendamping Desa sesuai dengan Upah Minimum Regional Provinsi** menunjukkan bahwa terdapat 30 responden atau 20.55% yang menyatakan sangat setuju, 98 responden atau 53.70% yang menyatakan setuju, 34 responden atau 13.97% yang menyatakan kurang setuju, 38 responden atau 10.41% yang menyatakan tidak setuju, dan 10 responden atau 1.37% yang menyatakan sangat tidak setuju.

Dari hasil analisis skor data di atas, maka dapat diperoleh persentase skor pencapaian sebagai berikut:

$$\frac{730}{1.000} \times 100\% = 73\%$$

Selanjutnya angka 73% tersebut dikonsultasikan dengan Kriteria Penilaian, maka hasil tersebut dikategorikan pada kriteria **Sesuai**.

Tabel 4.27 Pendamping Desa tidak perlu lagi mencari tambahan pendapatan selain gaji bulanan dan tunjangan lainnya yang diterima untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di Desa

Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi (f)	Skor Total	Prosentase (%)	Total Prosentase (%)
Sangat Setuju	5	23	115	19.07	603 ----- = 60.30% 1.000
Setuju	4	49	196	32.50	
Kurang Setuju	3	65	195	32.34	
Tidak Setuju	2	35	70	11.61	
Sangat Tidak Setuju	1	27	27	4.48	
Jumlah		200	603	100	

Data Olahan Penelitian 2019

Berdasarkan tabel 4.27 di atas tentang **Pendamping Desa tidak perlu lagi mencari tambahan pendapatan selain gaji bulanan dan tunjangan lainnya yang diterima untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di Desa** menunjukkan bahwa terdapat 23 responden atau 19.07% yang menyatakan sangat setuju, 49 responden atau 32.50% yang menyatakan setuju, 65 responden atau 32.33% yang menyatakan kurang setuju, 35 responden atau 11.61% yang menyatakan tidak setuju, 27 responden atau 4.48% yang menyatakan sangat tidak setuju.

Dari hasil analisis skor data di atas, maka dapat diperoleh persentase skor pencapaian sebagai berikut:

$$\frac{603}{1.000} \times 100\% = 60.30\%$$

Selanjutnya angka 60.30% tersebut dikonsultasikan dengan Kriteria Penilaian, maka hasil tersebut dikategorikan pada kriteria **Cukup**.

Sebagai kesimpulan umum dari kesesuaian gaji pendamping Desa berdasarkan kondisi perekonomian dan kondisi geografis Desa dapat dilihat pada tabel Akumulasi berikut:

Tabel 4.28 Rekapitulasi

Rumusan Masalah	Tabel	Bobot Skor										Total Prosentase (%)
		5		4		3		2		1		
		F	X	F	X	F	X	F	X	F	X	
Keempat (3.4)	4.23	54	270	105	420	26	78	11	22	3	3	3.381 ----- = 67.62% 5.000
	4.24	28	140	72	288	48	144	31	62	21	21	
	4.25	25	125	62	248	44	132	36	72	23	23	
	4.26	30	150	98	392	34	102	38	76	10	10	
	4.27	23	115	49	196	65	195	35	70	27	27	
Jumlah		160	800	386	1544	217	651	151	302	84	84	
Skor Total		3.381										

Data Olahan Penelitian 2019

Keterangan:

F = Frekuensi responden yang menjawab sesuai dengan kategori jawaban

X = Frekuensi dikalikan dengan Bobot nilai kategori jawaban.

Berdasarkan tabel 4.28 di atas maka dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata persentase Indikator Gaji Pendamping Desa berdasarkan kondisi perekonomian dan kondisi geografis Desa adalah **67.62%**, yang berarti termasuk pada Kategori **Kurang Sesuai**.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Informan diperoleh informasi bahwa: **Kesesuaian** Gaji Pendamping Desa dengan kondisi perekonomian dan kondisi geografis Desa **Kurang Sesuai**, karena semua indikator variabelnya perlu mendapatkan perhatian serius.

Sebagai kesimpulan umum dari **Kajian Kebijakan Pendamping Profesional Dalam Pengelolaan Dana Desa di Provinsi Gorontalo**, yang terdiri dari: 1) jumlah Pendamping Desa sudah memadai jika dikaji dari **Kondisi Geografis dan Variasi Kompleksitas permasalahan** di

Desa, 2) penyebaran Pendamping Desa sudah memadai jika dikaji dari kondisi Geografis Desa, 3) Kualifikasi pendidikan (tingkat pendidikan, bidang ilmu , dan Diklat Teknis) Pendamping Desa Menunjang dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, dan 4) Gaji Pendamping Desa sudah Adil dan Cukup jika dikaji dari Kondisi Perekonomian dan Kondisi Geografis Desa dapat dilihat pada tabel Akumulasi berikut:

Tabel 4.29 Hasil Akumulasi

Judul	Variabel	Bobot Skor										Total Prosentase (%)
		5		4		3		2		1		
		F	X	F	X	F	X	F	X	F	X	
Kajian Kebijakan Pendamping Profesional	4.1	303	1515	468	1872	150	450	69	138	10	10	15.318 ----- = 76.59% 20.000
	4.2	214	1070	528	2112	183	549	64	128	8	8	
	4.3	351	1755	520	2080	82	246	25	50	11	11	
	4.4	160	800	386	1544	217	651	151	302	27	2	
Jumlah		1028	5140	1902	7608	632	1896	309	618	56	56	
Skor Total		15.318										

Data Olah Penelitian 2019

Keterangan:

F = Frekuensi responden yang menjawab sesuai dengan kategori jawaban

X = Frekuensi dikalikan dengan Bobot nilai kategori jawaban.

Berdasarkan tabel 4.29 di atas maka dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata persentase Variabel **Kajian Kebijakan Pendamping Profesional Dalam Pengelolaan Dana Desa di Provinsi Gorontalo**, yang terdiri dari: 1) jumlah Pendamping Desa sudah memadai jika dikaji dari Kondisi Geografis dan Variasi Kompleksitas permasalahan di Desa, 2) penyebaran Pendamping Desa sudah memadai jika dikaji dari kondisi Geografis Desa, 3) Kualifikasi pendidikan (tingkat pendidikan, bidang ilmu, dan Diklat Teknis) Pendamping Desa Menunjang dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, dan 4) Gaji Pendamping Desa

sudah Adil dan Cukup jika dikaji dari Kondisi Perekonomian dan Kondisi Geografis adalah 76.59%, yang berarti termasuk pada Kategori Sesuai (71 – 85%).

B. PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Kesesuaian jumlah Pendamping Desa dikaji dari Kondisi Geografis dan Variasi Kompleksitas permasalahan di Desa;

Kesesuaian jumlah Pendamping Desa dikaji dari Kondisi Geografis dan Variasi Kompleksitas permasalahan di Desa, yang dikaji dari 5 (lima) indikator secara berurut frekuensi dan skornya adalah sebagai berikut:

1) Kategori Sesuai atau Setuju memperoleh frekuensi 469 dengan Skor 1.878, 2) Kategori Sangat Sesuai atau Sangat Setuju memperoleh frekuensi 303 dengan Skor 1.515, 3) Kategori Kurang Sesuai atau Kurang Setuju memperoleh frekuensi 150 dengan Skor 450, 4) Kategori Tidak Sesuai atau Tidak Setuju memperoleh frekuensi 69 dengan Skor 138, 5) Kategori Sangat Tidak Sesuai atau Sangat Tidak Setuju memperoleh frekuensi 10 dengan Skor 10. Secara keseluruhan nilai prosentase dari variabel Kesesuaian jumlah Pendamping Desa dikaji dari Kondisi Geografis dan Variasi Kompleksitas permasalahan di Desa adalah 79.78%. Hal ini berarti bahwa variabel Kesesuaian jumlah Pendamping Desa dikaji dari Kondisi Geografis dan Variasi Kompleksitas permasalahan di Desa termasuk pada kategori sudah Sesuai. Namun yang perlu dicermati adalah indikator yang tidak

mencapai nilai minimal 80%, yaitu Jumlah Desa yang menjadi wilayah tanggung jawab sudah memadai dengan kemampuan fisik masing-masing Pendamping Desa (74.30%) dan Jumlah Pendamping Desa pada masing-masing Desa/Wilayah disesuaikan dengan kompleksitas permasalahan di Desa (79%).

2. Kesesuaian penyebaran Pendamping Desa dengan kondisi Geografis Desa;

Kesesuaian penyebaran Pendamping Desa dengan kondisi Geografis Desa, yang dikaji dari 5 (lima) indikator secara berurut frekuensi dan skornya adalah sebagai berikut: 1) Kategori Sesuai atau Setuju memperoleh frekuensi 528 dengan Skor 2.112, 2) Kategori Sangat Sesuai atau Sangat Setuju memperoleh frekuensi 214 dengan Skor 1.070, 3) Kategori Kurang Sesuai atau Kurang Setuju memperoleh frekuensi 183 dengan Skor 549, 4) Kategori Tidak Sesuai atau Tidak Setuju memperoleh frekuensi 64 dengan Skor 138, 5) Kategori Sangat Tidak Sesuai atau Sangat Tidak Setuju memperoleh frekuensi 8 dengan Skor 8. Secara keseluruhan nilai prosentase dari variabel Kesesuaian penyebaran Pendamping Desa dengan kondisi Geografis Desa adalah 77.34%. Hal ini berarti bahwa variabel Kesesuaian jumlah Pendamping Desa dikaji dari Kondisi Geografis dan Variasi Kompleksitas permasalahan di Desa termasuk pada kategori sudah Sesuai. Namun yang perlu dicermati adalah indikator yang tidak mencapai nilai

minimal 80%, yaitu Penyebaran Pendamping Desa pada masing-masing Desa/Wilayah bervariasi sesuai Variasi Kompleksitas permasalahan di Desa (75.10%), Penyebaran Pendamping Desa pada masing-masing Desa/Wilayah merata berdasarkan Status Desa yang terdiri dari Desa Maju, Berkembang, Tertinggal, dan Sangat Tertinggal (78.30%), Penyebaran Pendamping Desa pada masing-masing Desa/Wilayah sudah disesuaikan dengan kemampuan fisik masing-masing Pendamping Desa (75%), Penyebaran Pendamping Desa pada masing-masing Desa/Wilayah bervariasi sesuai kondisi geografis Desa dan Variasi Kompleksitas permasalahan di Desa (77%).

3. Dukungan Kualifikasi pendidikan (tingkat pendidikan, bidang ilmu , dan Diklat Teknis) Pendamping Desa dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya;

Kesesuaian Dukungan Kualifikasi pendidikan (tingkat pendidikan, bidang ilmu , dan Diklat Teknis) Pendamping Desa dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, yang dikaji dari 5 (lima) indikator secara berurut frekuensi dan skornya adalah sebagai berikut: 1) Kategori Sesuai atau Setuju memperoleh frekuensi 520 dengan Skor 2.080, 2) Kategori Sangat Sesuai atau Sangat Setuju memperoleh frekuensi 351 dengan Skor 1.755, 3) Kategori Kurang Sesuai atau Kurang Setuju memperoleh frekuensi 82 dengan Skor 246, 4) Kategori Tidak Sesuai atau Tidak Setuju memperoleh frekuensi 25 dengan Skor 50, 5)

Kategori Sangat Tidak Sesuai atau Sangat Tidak Setuju memperoleh frekuensi 11 dengan Skor 11. Secara keseluruhan nilai prosentase dari variabel Kesesuaian penyebaran Pendamping Desa dengan kondisi Geografis Desa adalah 82.88%. Hal ini berarti bahwa variabel Kesesuaian Dukungan Kualifikasi pendidikan (tingkat pendidikan, bidang ilmu, dan Diklat Teknis) Pendamping Desa dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya termasuk pada kategori sudah Sesuai. Namun yang perlu dicermati adalah indikator yang tidak mencapai nilai minimal 80%, yaitu Bidang Keilmuan atau Program Studi Pendamping Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Desa (76.90%).

4. Gaji Pendamping Desa berdasarkan Kondisi Perekonomian dan Kondisi Geografis Desa;

Kesesuaian Gaji Pendamping Desa berdasarkan Kondisi Perekonomian dan Kondisi Geografis Desa, yang dikaji dari 5 (lima) indikator secara berurut frekuensi dan skornya adalah sebagai berikut: 1) Kategori Sesuai atau Setuju memperoleh frekuensi 386 dengan Skor 1.544, 2) Kategori Kurang Sesuai atau Kurang Setuju memperoleh frekuensi 217 dengan Skor 651, 3) Kategori Sangat Sesuai atau Sangat Setuju memperoleh frekuensi 160 dengan Skor 800, 4) Kategori Tidak Sesuai atau Tidak Setuju memperoleh frekuensi 151 dengan Skor 301, 5) Kategori Sangat Tidak Sesuai atau Sangat Tidak Setuju memperoleh

frekuensi 84 dengan Skor 84. Secara keseluruhan nilai prosentase dari variabel Kesesuaian penyebaran Pendamping Desa dengan kondisi Geografis Desa adalah 67.62%. Hal ini berarti bahwa variabel termasuk pada kategori Kurang Sesuai, dan yang perlu dicermati adalah semua indikator variabelnya tidak mencapai nilai minimal 80%.

5. Kajian Kebijakan Pendamping Profesional Dalam Pengelolaan Dana Desa di Provinsi Gorontalo, yang terdiri dari: 1) jumlah Pendamping Desa sudah memadai jika dikaji dari Kondisi Geografis dan Variasi Kompleksitas permasalahan di Desa, 2) penyebaran Pendamping Desa sudah memadai jika dikaji dari kondisi Geografis Desa, 3) Kualifikasi pendidikan (tingkat pendidikan, bidang ilmu, dan Diklat Teknis) Pendamping Desa Menunjang dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, dan 4) Gaji Pendamping Desa sudah Adil dan Cukup jika dikaji dari Kondisi Perekonomian dan Kondisi Geografis secara berurut frekuensi dan skornya adalah sebagai berikut: 1) Kategori Sesuai atau Setuju memperoleh frekuensi 1.902 dengan Skor 7.608, 2) Kategori Sangat Sesuai atau Sangat Setuju memperoleh frekuensi 1.028 dengan Skor 5.140, 3) Kategori Kurang Sesuai atau Kurang Setuju memperoleh frekuensi 632 dengan Skor 1.896, 4) Kategori Tidak Sesuai atau Tidak Setuju memperoleh frekuensi 309 dengan Skor 618, 5) Kategori Sangat Tidak Sesuai atau Sangat Tidak Setuju memperoleh frekuensi 56 dengan Skor 56. Secara keseluruhan nilai prosentase dari variabel Kesesuaian penyebaran Pendamping Desa dengan kondisi Geografis Desa adalah 76.59%. Hal

ini berarti bahwa Kajian Kebijakan Pendamping Profesional Dalam Pengelolaan Dana Desa di Provinsi Gorontalo, yang terdiri dari: 1) jumlah Pendamping Desa sudah memadai jika dikaji dari Kondisi Geografis dan Variasi Kompleksitas permasalahan di Desa, 2) penyebaran Pendamping Desa sudah memadai jika dikaji dari kondisi Geografis Desa, 3) Kualifikasi pendidikan (tingkat pendidikan, bidang ilmu, dan Diklat Teknis) Pendamping Desa Menunjang dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, dan 4) Gaji Pendamping Desa sudah Adil dan Cukup jika dikaji dari Kondisi Perekonomian dan Kondisi Geografis termasuk pada kategori **Sudah Sesuai**. Namun yang perlu dicermati adalah variabel keempat, yaitu kesesuaian Gaji Pendamping Desa berdasarkan Kondisi Perekonomian dan Kondisi Geografis Desa, termasuk pada kategori Kurang Sesuai, sedangkan variabel pertama, kedua, dan ketiga semuanya termasuk pada kategori Sesuai.

6. Eksistensi Pendamping Profesional Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Provinsi Gorontalo, belum seluruhnya tercukupi sesuai ketentuan yang berlaku.;

Keseluruhan jumlah Pendamping Profesional Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Provinsi Gorontalo adalah 348 orang, yang terdiri dari: 1) Tenaga Ahli Kabupaten; 30 orang, 2) Tenaga Ahli Kecamatan; 140 orang, dan 3) Pendamping Lokal Desa; 178 orang. Namun kondisi riil dilapangan bahwa jumlah Pendamping Profesional Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Provinsi Gorontalo adalah 348 orang, yang terdiri dari: 1) Tenaga Ahli Kabupaten; 30 orang, 2) Tenaga Ahli Kecamatan; 140 orang, dan 3)

Pendamping Lokal Desa; 178 orang. Hal ini berarti bahwa kebutuhan akan Pendamping Profesional Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Provinsi Gorontalo secara keseluruhan belum terpenuhi.

7. Perbandingan Status Desa di Provinsi Gorontalo Tahun 2016 dan 2019.

Pengalokasian Dana Desa dan Dana Pendamping Profesional Desa di Provinsi Gorontalo yang telah dimulai sejak tahun 2015 telah meningkatkan Status Desa di Provinsi Gorontalo secara signifikan yang dicirikan oleh: 1) meningkatnya jumlah Desa Maju dari 14 Desa menjadi 82 Desa, 2) meningkatnya jumlah Desa Berkembang dari 265 Desa menjadi 414 Desa, 3) menurunnya Desa Tertinggal dari 349 Desa menjadi 154 Desa, 4) menurunnya Desa Sangat Tertinggal dari 29 Desa menjadi 7 Desa. Namun yang tidak ada perkembangan adalah jumlah Desa Mandiri yang sampai dengan sekarang tetap tidak ada di Provinsi Gorontalo.

BAB V

KESIMPULAN PENELITIAN DAN REKOMENDASI PENELITIAN

A. KESIMPULAN PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dikemukakan kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Nilai rata-rata persentase Variabel Kesesuaian jumlah Pendamping Desa dikaji dari Kondisi Geografis dan Variasi Kompleksitas permasalahan di Desa adalah **79.78%**, yang berarti termasuk pada Kategori **Sesuai (71-85%)**. Namun yang perlu dicermati adalah indikator yang tidak mencapai nilai minimal 80%, yaitu Jumlah Desa yang menjadi wilayah tanggung jawab sudah memadai dengan kemampuan fisik masing-masing Pendamping Desa (74.30%) dan Jumlah Pendamping Desa pada masing-masing Desa/Wilayah disesuaikan dengan kompleksitas permasalahan di Desa (79%).
2. Nilai rata-rata persentase Indikator Kesesuaian penyebaran Pendamping Desa dikaji dari Kondisi Geografis dan Variasi Kompleksitas permasalahan di Desa adalah **77.34%**, yang berarti termasuk pada Kategori **Sesuai (71-85%)**. Namun yang perlu dicermati adalah indikator yang tidak mencapai nilai minimal 80%, yaitu Penyebaran Pendamping Desa pada masing-masing Desa/Wilayah bervariasi sesuai Variasi Kompleksitas permasalahan di Desa (75.10%), Penyebaran Pendamping Desa pada masing-masing Desa/Wilayah merata

berdasarkan Status Desa yang terdiri dari Desa Maju, Berkembang, Tertinggal, dan Sangat Tertinggal (78.30%), Penyebaran Pendamping Desa pada masing-masing Desa/Wilayah sudah disesuaikan dengan kemampuan fisik masing-masing Pendamping Desa (75%), Penyebaran Pendamping Desa pada masing-masing Desa/Wilayah bervariasi sesuai kondisi geografis Desa dan Variasi Kompleksitas permasalahan di Desa (77%).

3. Nilai rata-rata persentase Indikator dukungan kualifikasi pendidikan (tingkat pendidikan, bidang ilmu, dan diklat teknis) Pendamping Desa dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah **82.84%**, yang berarti termasuk pada Kategori **Sesuai (71 – 85%)**. Namun yang perlu dicermati adalah indikator yang tidak mencapai nilai minimal 80%, yaitu Bidang Keilmuan atau Program Studi Pendamping Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Desa (76.90%).
4. Nilai rata-rata persentase Indikator Gaji Pendamping Desa berdasarkan kondisi perekonomian dan kondisi geografis Desa adalah **67.62%**, yang berarti termasuk pada Kategori **Kurang Sesuai (51 – 70%)**. Namun yang perlu dicermati adalah semua indikator variabelnya tidak mencapai nilai minimal 80%.
5. Eksistensi Pendamping Profesional Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Provinsi Gorontalo, belum seluruhnya tercukupi sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Perbandingan Status Desa di Provinsi Gorontalo Tahun 2016 dan 2019 adalah: a) Status Desa Mandiri tetap tidak ada, b) Status Desa Maju meningkat dari 14 Desa menjadi 82 Desa, c) Status Desa Berkembang meningkat dari 265 Desa menjadi 414 Desa, d) Status Desa Tertinggal menurun dari 349 Desa menjadi 154 Desa, dan e) Status Desa Sangat Tertinggal menurun dari 29 Desa menjadi 7 Desa.

B. REKOMENDASI PENELITIAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian maka direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penempatan Pendamping Profesional Desa terutama Pendamping Lokal Desa sebaiknya secara prioritas yang berasal dari Desa itu sendiri atau se Kecamatan dengan Desa tersebut atau se Kabupaten dengan Desa tersebut;
2. Jumlah Wilayah Kerja Pendamping Profesional Desa sebaiknya bervariasi berdasarkan kondisi geografis dan status Desa;
3. Pendamping Profesional Desa pada semua tingkatan sebaiknya juga dibekali dengan pengetahuan tentang: 1) Pemetaan potensi sumber daya pembangunan daerah dan 2) Master plan pengembangan Komoditas, Produk, Jenis Usaha (KPJu) Unggulan Daerah Kabupaten;
4. Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebaiknya memprogramkan penelitian lanjutan tentang Kontribusi Alokasi Dana Desa dan Pendamping Desa terhadap Pencapaian Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional di masing-masing Provinsi, yang akan mengkaji: 1) Seberapa Besar Kontribusi Alokasi Dana Desa dan Pendamping Desa

Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa, 2) Seberapa Besar Kontribusi Alokasi Dana desa dan Pendamping Desa Terhadap Pemenuhan Standar Pelayanan Umum di Desa, 3) Seberapa Besar Kontribusi Alokasi Dana Desa dan Pendamping Desa Terhadap Pencapaian Sasaran: 3.1) Berkurangnya Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal dan 3.2) Bertambahnya Jumlah Desa Mandiri dan Maju, 4) Bagaimana Keberlanjutan Pendamping Profesional Desa dalam Pengelolaan Dana Desa, yang dikaji dari: 4.1) Pelaksanaan Tupoksi Pendamping Desa, 4.2) Penyediaan Anggaran Pendamping Desa oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, 4.3) Kelayakan Besaran Honor Pendamping Desa, 4.4) Eksistensi dan Kesiapan Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah, dan 5) Sampai dengan kapan waktunya Desa bisa Mandiri dalam Pengelolaan Dana Desa sehingga tidak memerlukan lagi eksistensi Pendamping Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwas, M. Oos. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Penerbit Alfabeta: Bandung.
- Hikmat, Harry. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Humaniora.
- Kartasasmita, Ginanjar, (2014). *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Pustaka Cidessindo: Jakarta.
- ., (2014). *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*, BAPPENAS : Jakarta
- Mafruhah, Izza. (2013). *Multidimensi Kemiskinan*. LPP UNS : Surakarta.
- Mardikanto, Totok. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat*.: Penerbit Alfabeta: Bandung.
- Polak, Paul. (2008). *Out of Poverty : What Works When Traditional Approaches Fail*. San Fransisco : Berrett-Koehler Publishers, Inc.
- Sumodiningrat, Gunawan, (1999). *Pemberdayaan Masyarakat, Jaring Pengaman Sosial*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- , (1997). *Kemiskinan : Teori, Fakta dan kebijakan*, impac Edisi
- Soleh, Chabib, dan Rochmansjah, Heru, (2014). *Pengelolaan Keuangan Desa*, Penerbit Fokusmedia : Bandung.
- Soleh, Chabib, dan Rochmansjah, Heru, (2015). *Pengelolaan Keuangan Desa*, Penerbit Fokusmedia : Bandung.
- Sudjatmiko, Budiman, dan Zakaria, Yando, (2015). *Desa Kuat, Indonesia Hebat*, Penerbit Pustaka Yustisia: Yogyakarta.
- Suharto, Edi. 2015. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- , 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Alfabeta : Bandung.
- Badan Pusat Statistik, Provinsi Gorontalo, (2018). *Gorontalo Dalam Angka*, Penerbit Badan Pusat Statistik : Gorontalo.
- Badan Pusat Statistik, Provinsi Gorontalo, (2018). *Gorontalo Dalam PDRB*, Penerbit Badan Pusat Statistik : Gorontalo.

Lampiran 1

KAJIAN KEBIJAKAN PENDAMPING PROFESIONAL DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI PROVINSI GORONTALO INSTRUMEN PENELITIAN



TIM PENELITIAN

Prof. DR. ANI M. HASAN, M.Pd (Ketua)
DR. ROSMAN ILATO, M.Pd (Anggota)
DR. ABD. RAHMAN PAKAYA, M.Si (Anggota)
Drs. HARIS MAHMUD, S.Pd, M.Si (Anggota)
JUPRIANTO PULUHULAWA, S.H, M.H (Anggota)

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

OKTOBER 2019

**KAJIAN KEBIJAKAN PENDAMPING PROFESIONAL
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
DI PROVINSI GORONTALO**

DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN

Kajian Kebijakan Pendamping Profesional dalam Pengelolaan Dana Desa di Provinsi Gorontalo akan menganalisis dan mengetahui tentang:

1. Apakah jumlah Pendamping Desa sudah memadai jika dikaji dari Kondisi Geografis dan Variasi Kompleksitas permasalahan di Desa; Perhatikan Klasifikasi Desa;
2. Apakah penyebaran Pendamping Desa sudah memadai jika dikaji dari kondisi Geografis Desa;
3. Apakah Kualifikasi pendidikan (tingkat pendidikan, bidang ilmu , dan Diklat Teknis) Pendamping Desa Menunjang dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya;
4. Apakah Gaji Pendamping Desa sudah Adil dan Cukup jika dikaji dari Kondisi Perekonomian dan Kondisi Geografis Desa;

I. Identitas

Pada bagian identitas ini, untuk menjaga kerahasiaan jawaban, Bapak/Ibu tidak perlu menuliskan nama, dan hanya menuliskan identitas lain seperti:

- Jabatan : 1. Pejabat atau Pelaksana di DPMD Provinsi Gorontalo
2. Pejabat atau Pelaksana di DPMD Kabupaten
3. Camat di Kecamatan
4. Kepala Desa di Desa
- Kecamatan
- Kabupaten
5. Aparat Desa di Desa
- Kecamatan
- Kabupaten
6. Masyarakat Desa di Desa

Kecamatan

Kabupaten

7. Pendamping Profesional di Kabupaten

8. Pendamping Profesional di Kecamatan

9. Pendamping Profesional di Desa

10. di Desa

Jenis kelamin :

Umur atau tanggal lahir :

Tingkat Pendidikan :

Status perkkawinan :

II. Petunjuk pengisian pertanyaan

1. Mohon semua pertanyaan dijawab dan dijawab sesuai dengan kondisi sebenarnya berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan pengamatan Bapak/Ibu;
2. Alternatif atau pilihan jawaban terdiri dari:
 - A.** Sangat Setuju: bila Bapak/Ibu merasa sangat setuju terhadap pernyataan tersebut;
 - B.** Setuju: bila Bapak/Ibu merasa setuju terhadap terhadap pernyataan tersebut;
 - C.** Kurang Setuju: bila Bapak/Ibu merasa Kurang Setuju terhadap pernyataan tersebut;
 - D.** Tidak Setuju: bila Bapak/Ibu merasa Tidak Setuju terhadap pernyataan tersebut;
 - E.** Sangat Tidak Setuju: bila Bapak/Ibu merasa Sangat Tidak Setuju terhadap pernyataan tersebut;
3. Pada Alternatif Jawaban yang telah Bapak/Ibu pilih Mohon diberi Tanda X

III. Item pertanyaan

No	Rumusan Masalah	Item Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
			A	B	C	D	E
1	Apakah jumlah Pendamping Desa sudah memadai jika dikaji dari Kondisi Geografis dan Variasi	Jumlah Desa yang menjadi wilayah tanggung jawab sudah memadai dengan kemampuan fisik masing-masing Pendamping Desa					
2	Kondisi Geografis dan Variasi	Jumlah Pendamping Desa pada masing-masing Desa/Wilayah disesuaikan dengan kondisi geografis Desa					
3	Kompleksitas permasalahan di Desa; Perhatikan Klasifikasi Desa;	Jumlah Pendamping Desa pada masing-masing Desa/Wilayah disesuaikan dengan kompleksitas permasalahan di Desa					
4	Desa;	Jumlah Desa yang menjadi wilayah tanggung jawab masing-masing Pendamping Desa adalah gabungan dari berbagai Status Desa yang terdiri dari Desa Maju, Berkembang, Tertinggal, dan Sangat Tertinggal					
5	Apakah penyebaran Pendamping Desa sudah memadai jika dikaji dari	Jumlah Desa yang menjadi wilayah tanggung jawab masing-masing Pendamping Desa disesuaikan dengan kondisi geografis Desa dan kompleksitas permasalahan di Desa					
6	Desa sudah memadai jika dikaji dari	Penyebaran Pendamping Desa pada masing-masing Desa/Wilayah bervariasi sesuai kondisi geografis Desa					
7		Penyebaran Pendamping Desa pada masing-masing Desa/Wilayah bervariasi sesuai Variasi Kompleksitas permasalahan di Desa					

8	kondisi Geografis Desa;	Penyebaran Pendamping Desa pada masing-masing Desa/Wilayah merata berdasarkan Status Desa yang terdiri dari Desa Maju, Berkembang, Tertinggal, dan Sangat Tertinggal					
9		Penyebaran Pendamping Desa pada masing-masing Desa/Wilayah sudah disesuaikan dengan kemampuan fisik masing-masing Pendamping Desa					
10		Penyebaran Pendamping Desa pada masing-masing Desa/Wilayah bervariasi sesuai kondisi geografis Desa dan Variasi Kompleksitas permasalahan di Desa					
11	Apakah Kualifikasi pendidikan (tingkat pendidikan, bidang ilmu, dan Diklat Teknis) Pendamping	Tingkat pendidikan Pendamping Desa menunjang dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai Pendamping Desa					
12		Tingkat pendidikan Pendamping Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Desa					
13	Desa Menunjang dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya;	Bidang Keilmuan atau Program Studi Pendamping Desa menunjang dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai Pendamping Desa					
14		Bidang Keilmuan atau Program Studi Pendamping Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Desa					
15		Keikutsertaan Pendamping Desa pada Diklat Teknis menunjang dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai Pendamping Desa					

16	Apakah Gaji Pendamping Desa sudah Adil dan	Besaran gaji bulanan dan tunjangan lainnya yang akan diterima oleh Pendamping Desa sudah disampaikan sebelum pelaksanaan program pendampingan Desa					
17	Cukup jika dikaji dari Kondisi Perekonomian dan Kondisi Geografis	Tidak ada kecemburuan dikalangan Pendamping Desa dalam hal besaran gaji bulanan dan tunjangan lainnya yang diterima oleh masing-masing Pendamping Desa sekalipun kondisi geografis desa bervariasi					
18	Desa;	Besaran gaji bulanan dan tunjangan lainnya yang diterima oleh Pendamping Desa sesuai dengan kebutuhan minimal Pendamping Desa di wilayahnya masing-masing					
19		Besaran gaji bulanan dan tunjangan lainnya yang diterima oleh Pendamping Desa sesuai dengan Upah Minimum Regional Provinsi					
20		Pendamping Desa tidak perlu lagi mencari tambahan pendapatan selain gaji bulanan dan tunjangan lainnya yang diterima untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di Desa					

IV. PEDOMAN WAWANCARA

- 4.1 Apakah jumlah Pendamping Desa sudah memadai jika dikaji dari Kondisi Geografis dan Variasi Kompleksitas permasalahan di Desa; Perhatikan Klasifikasi Desa;
 - 4.1.1 Apakah Jumlah Pendamping Desa pada masing-masing Desa/Wilayah disesuaikan dengan kondisi geografis Desa?
 - 4.1.2 Apakah Jumlah Pendamping Desa pada masing-masing Desa/Wilayah disesuaikan dengan Variasi Kompleksitas permasalahan di Desa?
 - 4.1.3 Apakah yang Bapak/Ibu Rekomendasikan tentang Apakah jumlah Pendamping Desa sudah memadai jika dikaji dari Kondisi Geografis dan Variasi Kompleksitas permasalahan di Desa?
- 4.2 Apakah penyebaran Pendamping Desa sudah memadai jika dikaji dari kondisi Geografis Desa dan Variasi Kompleksitas permasalahan di Desa;
 - 4.2.1 Apakah Penyebaran Pendamping Desa pada masing-masing Desa/Wilayah bervariasi sesuai kondisi geografis Desa?
 - 4.2.2 Apakah Penyebaran Pendamping Desa pada masing-masing Desa/Wilayah bervariasi sesuai Variasi Kompleksitas permasalahan di Desa?
 - 4.2.3 Apakah yang Bapak/Ibu Rekomendasikan tentang Apakah penyebaran Pendamping Desa sudah memadai jika dikaji dari kondisi Geografis Desa dan Variasi Kompleksitas permasalahan di Desa?
- 4.3 Apakah Kualifikasi pendidikan (tingkat pendidikan, bidang ilmu , dan Diklat Teknis) Pendamping Desa Menunjang dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya;
 - 4.3.1 Apakah Tingkat pendidikan Pendamping Desa menunjang dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai Pendamping Desa?
 - 4.3.2 Apakah Bidang Keilmuan atau Program Studi Pendamping Desa menunjang dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai Pendamping Desa?
 - 4.3.3 Apakah Diklat Teknis yang pernah diikuti Pendamping Desa menunjang dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai Pendamping Desa?
 - 4.3.4 Apakah yang Bapak/Ibu Rekomendasikan tentang Apakah Kualifikasi pendidikan (tingkat pendidikan, bidang ilmu , dan Diklat Teknis) Pendamping Desa Menunjang dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya?
- 4.4 Apakah Gaji Pendamping Desa sudah Adil dan Cukup jika dikaji dari Kondisi Perekonomian dan Kondisi Geografis Desa;
 - 4.4.1 Apakah Besaran gaji bulanan dan tunjangan lainnya yang akan diterima oleh Pendamping Desa sudah disampaikan sebelum pelaksanaan program pendampingan?

- 4.4.2 Apakah Tidak ada kecemburuan dikalangan Pendamping Desa dalam hal besaran gaji bulanan dan tunjangan lainnya yang diterima oleh masing-masing Pendamping Desa sekalipun kondisi geografis desa bervariasi?
- 4.4.3 Apakah Besaran gaji bulanan dan tunjangan lainnya yang diterima oleh Pendamping Desa sesuai dengan kebutuhan minimal Pendamping Desa di wilayahnya masing-masing?
- 4.4.4 Apakah Besaran gaji bulanan dan tunjangan lainnya yang diterima oleh Pendamping Desa sesuai dengan Upah Minimum Regional Provinsi?
- 4.4.5 Apakah Besaran gaji bulanan dan tunjangan lainnya yang diterima oleh Pendamping Desa sudah dirasakan Adil berdasarkan Kondisi Geografis Desa?
- 4.4.6 Apakah Besaran gaji bulanan dan tunjangan lainnya yang diterima oleh Pendamping Desa sudah dirasakan Cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal?
- 4.4.7 Apakah Besaran gaji bulanan dan tunjangan lainnya yang diterima oleh Pendamping Desa sudah dirasakan Cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup maksimal?
- 4.4.8 Apakah yang Bapak/Ibu Rekomendasikan tentang Apakah Gaji Pendamping Desa sudah Adil dan Cukup jika dikaji dari Kondisi Perekonomian dan Kondisi Geografis Desa?

SELAMAT BEKERJA DAN TERIMA KASIH

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Penelitian

1. Honorarium				
Honorarium	Honor/Jam (Rp)	Jam/Minggu	Minggu	Jumlah (Rp)
Penanggung Jawab Penelitian: (2 orang: UNG dan Satker Daerah)	75.000	15	8	18.000.000
Ketua Tim Peneliti (1 orang)	60.000	42	8	20.160.000
Sekretaris Peneliti (1 orang)	55.000	42	8	18.480.000
Anggota Peneliti (3 orang)	50.000	42	8	50.400.000
Peneliti Pembantu (10 orang)	35.000	35	4	49.000.000
Pengolah Data Penelitian (6 orang: 5 Kabupaten dan 1 Provinsi)	2.000.000	-	-	12.000.000
SUB TOTAL 1 (Rp)				168.040.000
2. Peralatan Penunjang				
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
-	-	-	-	-
SUB TOTAL 2 (Rp)				-
3. Bahan Habis Pakai				
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Kertas HVS F4 dan A4		10 rim	45.000	450.000
Toner Printer		4 unit	750.000	3.000.000
Buku catatan		8 buah	15.000	200.000
Polpen; 8 Orang x 3 buah		24 buah	15.000	360.000
Map		5 set	55.500	275.000
FGD kit: 6 daerah x 30 orang x 1 kali		180	35.000	6.300.000
Spanduk pada FGD x 6 kali		6	150.000	900.000
Konsumsi FGD; 6 daerah x 30 orang		180	58.000	10.440.000
Konsumsi tim peneliti: 5 orang x 60 hari		300	58.000	17.400.000
Konsumsi peneliti pembantu; 10 orang x 30 hari		300	58.000	17.400.000
Konsumsi pengolah data; 6 orang x 30 hari		180	58.000	10.440.000
SUB TOTAL (Rp)				67.165.000
4. Perjalanan				
Perjalanan	Justifikasi Perjalanan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Perjalanan Tim Peneliti mengikuti Rapat Koordinasi di Jakarta: - Tiket: 4 orang x 2 kali x pp - Penginapan: 4 orang x 2 kali x 3 hari - Harian: 4 orang x 2 kali x 4 hari		16 kali	2.000.000	32.000.000
		24 kali	750.000	18.000.000
		32 kali	530.000	16.960.000
Sewa mobil termasuk honor sopir dan BBM saat pengumpulan data di Kabupaten Gorontalo		20 kali	650.000	13.000.000
Sewa mobil termasuk honor sopir dan BBM saat pengumpulan data di Kabupaten Gorontalo Utara dan Bone Bolango		28 kali	650.000	18.200.000
Sewa mobil termasuk honor sopir dan BBM saat pengumpulan data di		18 kali	750.000	13.500.000

Kabupaten Boalemo dan Pohuwato				
Penginapan Tim Peneliti di Kabupaten Gorut; 2 kamar x 12 hari		24 hari	350.000	8.400.000
Penginapan Tim Peneliti di Kabupaten Boalemo dan Pohuwato; 2 kamar x 18 hari		24 hari	450.000	16.200.000
Uang Harian 3 orang Tim Peneliti saat melakukan penelitian di Kabupaten Gorontalo selama 20 hari		60 hari	300.000	18.000.000
Uang Harian 3 orang Tim Peneliti saat melakukan penelitian di Kabupaten Gorut dan Bone Bolango selama 28 hari		84 hari	300.000	25.200.000
Uang Harian 3 orang Tim Peneliti saat melakukan penelitian di Kabupaten Boalemo dan Pohuwato selama 18 hari		54 hari	370.000	19.980.000
SUB TOTAL (Rp)				199.440.000
5. Belanja Bahan Lainnya				
Kegiatan	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Operasional penyusunan, pengetikan, penggandaan, dan penjilidan proposal penelitian		1 paket	5.000.000	5.000.000
Operasional penyusunan, pengetikan, serta pengembangan instrumen		1 paket	2.000.000	2.500.000
Penggandaan instrumen: 10 Lembar x 132 desa x 5 orang responden		6.600	250	1.650.000
Operasional penyusunan, pengetikan, penggandaan, laporan kemajuan penelitian		1 paket	10.000.000	10.000.000
Operasional penyusunan logbook penelitian		1 paket	3.000.000	3.000.000
Operasional penyusunan, pengetikan, penggandaan, dan penjilidan laporan akhir		1 paket	10.000.000	10.000.000
Transport lokal peserta FGD; 6 daerah x 30 orang		180	150.000	27.000.000
Luaran Wajib dan Tambahan		1 paket	6.705.000	6.205.000
SUB TOTAL (Rp)				65.355.000
JUMLAH TOTAL (Rp)				500.000.000
TERBILANG: LIMA RATUS JUTA RUPIAH				

Lampiran 3. Biodata Tim Peneliti

1. Biodata Ketua Tim Peneliti

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap	Prof. Dr. Hj. Ani M. Hasan, M.Pd
2.	Jenis Kelamin	Perempuan
3.	Jabatan Fungsional	Guru Besar
4.	NIP/NIK/Identitas lainnya	19660820 199203 2 001
5.	NIDN	0020086606
6.	Tempat dan Tanggal Lahir	Kab. Gorontalo, 20 Agustus 1966
7.	E-mail	Ani_hasan2@yahoo.com dan animhasan@ung.ac.id
8.	Nomor Telepon /HP	085395587000
9.	Alamat Kantor	Kampus Jambura Program Studi Pendidikan Biologi Pascasarjana UNG Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6 Kota Gorontalo.
10.	Nomor Telepon/Faks	(0435) 821752
11.	Lulusan yang telah dihasilkan	- Alumni S1 = 320 orang - Alumni S2 = 86 orang - Alumni S3 = 3 Orang
12.	Mata Kuliah yang diampu	1. Mikrobiologi (S1) dan (S2)
		2. Metodologi Penelitian (S1)
		3. Kewirausahaan (S1)
		4. Strategi Belajar Mengajar (S1)
		5. Filsafat Ilmu (S3)

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	UNSRAT Manado Di Gorontalo	IKIP Negeri Malang	Universitas Negeri Malang
Bidang Ilmu	Pendidikan Biologi	Pendidikan Biologi	Pendidikan Biologi
Tahun Masuk-Lulus	Sep 1986 – Feb 1991, IPK 3,55.	Sep 1995 – Agst 1997, IPK 3,55	Sep 2000 – Sep 2003, IPK 3,93 (Cumlaude)
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Pengaruh Pemberian Bekicot terhadap Pertambahan Berat Ikan Mas (<i>Cyprinus caprio</i> L)	Pengaruh Jenis Starter, Macam dan Asal Bahan Baku Terhadap Kualitas Keju Lunak	Toksisitas Patulin dan Zearalenon terhadap Jaringan Mencit
Nama Pembimbing/Promotor	1. Dra. R. K. Haras 2. Drs. Ali Kaku	1. Dra. Herawati Susilo, M.Sc., Ph.D 2. Ir. Drs. M.M Ardhana, M.App.Sc, Ph.D	1. Prof. Dr. Duran Corebima, M.Pd 2. Ir. Drs. M.M Ardhana, M.App.Sc, Ph.D 3. Dra. Herawati Susilo, M.Sc.,

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan		
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)	
1.	2016	Penelitian Prioritas Nasional MP3EI “Pemberdayaan Petani Melalui Pengolahan Jagung dan Limbah Jagung menjadi Komoditas Ekonomi Produktif di Kabupaten Boalemo Propinsi Gorontalo” (Ketua-Lanjutan Tahun Ke-3)	HIBAH MP3EI	RP.150 jt	
12.	2016	Pengembangan Kurikulum Magister Pendidikan Biologi Bebas KIKNI.	PNBP Pascasarjana	Rp. 15 jt	
3.	2016	Potensi Terorisme pada Siswa Sekolah Menengah Atas (Anggota Tim)	BNPT-Jakarta	Rp,103jt 170rb	
3	4.	2015	Penelitian Prioritas Nasional MP3EI “Pemberdayaan Petani Melalui Pengolahan Jagung dan Limbah Jagung menjadi Komoditas Ekonomi Produktif di Kabupaten Boalemo Propinsi Gorontalo” (Ketua-Lanjutan Tahun Ke-2)	HIBAH MP3EI	RP.162jt 500 rb
25.	2015	Pemanfaatan Biji Nyamplung (<i>Calophyllum inophyllum</i>) sebagai bahan bakar alternatif Biodisel dan Absorben logam Pb dan Cu (Anggota Tim)	PNBP UNG	Rp. 60 juta	
16.	2015	Pengaruh Formulasi Krim Ikan Gabus terhadap Kesembuhan Luka Pasien Pasca Bedah di RSUD Prof Aloe Saboe Gorontalo (Anggota Tim- Lanjutan tahun Ke-2).	HIBAH BERSAING	Rp. 75 juta	
6	67.	2015	Kajian Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan Propinsi Gorontalo (Anggota Tim)	DIPA BKKBN Perwakilan Gorontalo 2015	Rp. 87 jt 700 rb
18.	2015	Profil Tahapan Keluarga Ditinjau dari Usia Perkawinan Pertama di Propinsi Gorontalo (Ketua Tim)	DIPA BKKBN Perwakilan Gorontalo 2015	Rp. 46 jt 650 rb	
69.	2014	Penelitian Prioritas Nasional MP3EI “Pemberdayaan Petani Melalui Pengolahan Jagung dan Limbah Jagung menjadi Komoditas Ekonomi Produktif di Kabupaten Boalemo Propinsi Gorontalo” (Ketua-Tahun Pertama)	HIBAH MP3EI	RP.167 jt 500 rb	
110.	2014	Pengaruh Formulasi Krim Ikan Gabus terhadap Kesembuhan Luka Pasien Pasca Bedah di RSUD Prof Aloe Saboe Gorontalo (Anggota	HIBAH BERSAING	Rp. 50 juta	

		Tahun Pertama).		
411.	Maret-Mei 2014	Survei Pemantauan PUS Peserta KB Aktif dan Survei Indikator RPJMN Propinsi Gorontalo Tahun 2014	DIPA BKKBN Perwakilan Gorontalo	Rp.180.307.500
212.	Mart-Juni 2013	Analisis Anomali CPR-TFR Kesertaan Ber-KB di Propinsi Gorontalo	DIPA BKKBN Perwakilan Gorontalo	Rp. 45 juta
13.	Juli-Nop 2013	Min Survey Pemantauan Pasangan Usia Subur (PUS) 2013	DIPA BKKBN Perwakilan Gorontalo	Rp. 79,5 juta
14.	Mei 2012	Problematika Hasil Ujian Nasional (UN) di SMA Se Kabupaten Gorontalo Utara dan Upaya Pemecahannya.	I'm Here, 2012	Rp. 30 juta

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1.	Juli 2017	Pemberdayaan Petani Aren melalui Pengolahan Nira menjadi Gula Semut di Desa Mingiilo Kecamatan Bulango Ulu	KKS Kebangsaan PNBPNB UNG	12 juta 500 ribu
2.	Juni 2016	Pemberdayaan Ibu-Ibu Rumah Tangga melalui Pengolahan Nira Aren menjadi Komoditas Ekonomi Produktif.	KKS- PNBPNB UNG	25 juta
3.	Feb 2016	Implementasi Produk Pendidikan Biologi “Inovatif dan Kreatif Bersama Alam”	PNBPNB Pascasarjana UNG	5 juta
4.	Des 2015	Profil Tahapan Keluarga Ditinjau dari Usia Perkawinan Pertama di Propinsi Gorontalo	DIPA BKKBN Perwakilan Gorontalo	10 juta
5.	Okt 2015	Workshop Pembangunan Berwawasan Kependudukan	DIPA BKKBN Perwakilan Gorontalo	25 juta
6.	Nov 2014	Pemanfaatan Limbah Organik Eceng Gondok pada Perairan Danau Limboto Menggunakan Mikroorganisme EM-4	PNBPNB UNG	3 juta
7.	2013	Peran Kepemimpinan PGRI	PGRI Propinsi Gorontalo	6 juta
8.	2013	Inventarisasi Kebijakan Pembagunan Berwawasan Kependudukan di Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota se Propinsi Gorontalo	DIPA BKKBN Perwakilan Prop.Gorontalo	14 juta

9.	2012	Membangun PGRI Kuat dan Bermartabat	PGRI Propinsi Gorontalo	15 juta
10.1	22 APRIL 2012	Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) Himpunan Mahasiswa Jurusan Biologi FMIPA	Dana Jurusan Biologi	Rp. 5 juta
11.	2012	Pemantapan Penulisan PTK bagi Guru	PNBP PPs UNG	Rp. 3 juta
12.	2012	Pelatihan Karawo bagi Anak Panti Asuhan Amal Soleh	Bank Indonesia Cabang Gorontalo	Rp. 5 juta
13.	2012	Pembinaan Upakati Bagi Industri Kecil dan Menengah se Propinsi Gorontalo	Perindag Propinsi Gorontalo	Rp. 10 juta
14.	10 Feb 2012	Trik-trik Penulisan Karya Tulis Ilmiah	Dana Jurusan Biologi	Rp. 5 juta
15.	Feb 2012	Kursus Pengelolaan Dewan Kerja (KPKD) Di Kwarda Gorontalo	Kwarda Gorontalo	Rp. 15 juta

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume Nomor/ Tahun
1.	Farmer Empowerment Trough Processing of Maize and Its Waste into Productive Economic Commodity in Boalemo reGENCY of Gorontalo	International Journal of Business Accounting and Management	Vol 1. Issue 3 ISSN 2527-3531 Dec 2016
2.	The Effect of Penetrant Enhancer Combination towards The Diffusion Rate of Snakehead Fish (<i>Ophiocephalus striatus</i>) Cream in Vitro and Vivo	International Journal of Pharm Tech Research CODEN (USA): IJPRIF	Vol. 9 No. 6, pp (508-513) ISSN: 0974-4304, ISSN(Online): 2455-9563
3.	Standar Mutu dan Profesionalisme Guru Menghadapi Masyarakat Ekonomi SEAN (MEA)	Prosiding Seminar Nasional dan Forum Pascasarjana LPTK Negeri se-Indonesia dgn Tema Mewujudkan Sinergitas LPTK Negeri dalam Mengembangkan Kemitraan Sumberdaya Pascasarjana di Era MEA	ISBN: 978-602-7411-1-9 7-9 Oktob 2016
4.	Editor	Prosiding Seminar	

		Nasional dan Forum Pascasarjana LPTK Negeri se-Indonesia dgn Tema Mewujudkan Sinergitas LPTK Negeri dalam Mengembangkan Kemitraan Sumberdaya Pascasarjana di Era MEA	ISBN: 978-602-7411-1-9 7-9 Oktob 2016
5.	Model Pengolahan Sampah melalui Pemberdayaan Perempuan Berbasis Vokasional di kabupaten Gorontalo.	Prosiding Seminar Nasional (Pemanfaatan Informasi Geospasial untuk Peningkatan Sinergi pengelolaan Lingkungan Hidup	ISBN: 978-602-73302-1-4 3 Sept 2016
6.	Editor	Prosiding Seminar Nasional II Biologi dan Pembelajarannya (Melalui Seminar & Workshop Biologi dan Pembelajaran Inovatif Kita Tingkatkan Daya Saing Bangsa)	ISBN: 978-602-431-036-3 http: pbxpo.om 9 Sep 2016
7.	Pemberdayaan Ibu-Ibu Rumah Tangga Melalui Pengolahan Nira Aren menjadi Komoditas Ekonomi Produktif di Desa Pilomonu.	Jurnal Pengabdian Sinergitas Pengabdian untuk Publik	Vo. 2, No. 5 Hal. 299-304. ISSN 2407-7313 Maret 2016.
8.	Penyunting Ahli	Jurnal Matsains	Vol 4 No. 1 Januari 2007 s/d Vol 9 No. 1 Januari 2012
9.	Optimalisasi Kepemimpinan Meminimalisasi Gerakan Terorisme	Jurnal Manajemen Pendidikan Indonesia ISSN: 1979-6684.	Vol 3 No. 1 April 2011
10.	Transparansi Manajemen Nasional dapat Menanggulangi Terorisme	Jurnal Manajemen Pendidikan Indonesia : ISSN: 1979-6684	Vol.3 No.2 Oktober 2011
11.	Penyunting Ahli	Buletin Sibermas	Vol. 4 No. 5 Des 2011. ISSN 1907-025X

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentasio) dalam 5 Tahun Terakhir

N No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
------	---------------------------------	----------------------	------------------

1.	Seminar dan Pelantikan PERGUNU Gorontalo	Perlindungan Hukum Bagi Guru (Tantangan dan Solusi)	10 Mey 2017, Aula IAIN Sultan Amai Gorontalo
2.	Pelatihan Khusus KOHATI	Kecerdasan Intelektual, Emosional dan Spritual	1 April 2017, Gedung Kasmat Lahay Limboto Kab. Gorontalo
3.	Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Peran FKPT dalam Penanggulangan Terorisme di propinsi Gorontalo	2 Maret 2017, Aula Kantor Kesbangpol Gorontalo Utara.
4.	Seminar dan Konferensi Kerja PGRI Kabupaten Boalemo	Peran Perempuan dalam Mewujudkan Pendidikan Bermutu	Maret 2017, Bolihutuo-Boalemo
5.	Seminar Sehari dalam Rangka Peringatan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI Ke-72	Grand Strategi Kesiapan Guru Memelihara Lingkungan melalui Etika dan Perilaku dalam Mengeksploitasi Sumber Daya Alam	Nov 2016, Kab Boalemo - Gorontalo
6.	KONASPI ke- VIII – 2016	Gambaran Singkat Implementasi Kompetensi Guru di Propinsi Gorontalo	Okt 2016, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta
7.	Seminar Membedah Masalah dan Solusi Kekerasan dalam Pendidikan dan Kriminalisasi Guru	Peran PGRI terhadap Perlindungan Guru	17 Sep 2016, Gedung Auditorium Universitas Negeri Gorontalo
8.	Seminar Nasional dan Forum Pascasarjana LPTK Negeri se-Indonesia	Standar Mutu dan Profesionalisme Guru Menghadapi Masyarakat Ekonomi SEAN (MEA)	7-9 Okt 2016, Hotel DAMHIL UNG
9.	Seminar Pemantapan Nilai-nilai Empat Konsensus Dasar Kebangsaan Tingkat Kab. Gorontalo Tahun 2016	Memahami Filsafat Pancasila sebagai Idiologi Terbuka demi Mewujudkan Kabupaten Gemilang Menuju Masyarakat Madani	16 September 2016, Aula Marten Liputo,
10.	Seminar Nasional	Guru sebagai Pendidik Profesional	Aula Kampus, Fak Tarbiah
11.	Workshop PLKB	Cara Memotivasi Diri untuk Mengedepankan Orang lain	Mega Janur, 20 Nov 2015
21 2.	Sosialisasi pada SKPD terkait tentang Tahapan Keluarga Sejahtera	Profil Tahapan Keluarga Sejahtera ditinjau dari Usia Perkawinan Pertama di Propinsi Gorontalo.	Grand Hotel Gorontalo, 5 Nov 2015

11 3.	Temu Pakar Pancasila, UUD1945 dan Sistem Ketatanegaraan	Implementasi Nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Sistem Ketatanegaraan Indonesia ditinjau dari Sistem pendidikan Nasional	12 Okt 2015, Hotel Maqna Gorontalo
31 4.	Seminar Sehari Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Nilai-nilai Pancasila dan Idiologi Ekstrim Pengaruhnya terhadap Etika dan Budaya Kebangsaan	Limboto Indah, 7 Oktober 2015
15.	Seminar NASIONAL dalam rangka mengperingati hari Guru Internasional menyambut Hari Guru Nasional dan HUT ke 70 PGRI	Profesionalisme Guru menghadapi Ujian Kompetensi Guru (UKG) dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)	Tilamuta, 5 Oktober 2015
51 6.	Sosialisasi hasil Penelitian kepada Stake holder se Propinsi Gorontalo.	Profil Tahapan Keluarga Sejahtera ditinjau dari Usia Perkainan Pertama di Propinsi Gorontalo	BKKBN, 4 Oktober 2015
17.	Seminar Internas Matricesfor IITTEP Conjunction with IcoMaNSEd, 2015	Empower Farmers in Processing Maize and Waste Maize into Productive Economy	Manado, 7-8 Agustus 2015
18.	Seminar sehari PGRI Boalemo	Mewujudkan Revolusi mental melalui Penguatan Peran Strategis Guru dan PGRI	Bolihutuo 22 Februari 2015
19.	Seminar Sehari Revolusi Mental dan Penguatan Peran Strategis Guru dan PGRI	Revolusi Mental dan Penguatan Peran Strategis Guru dan PGRI	2015, di Aula Pantai Boliohuto Kecamatan Botomoito di Kabupaten Boalemo
20.	Workshop Pemberdayaan Komite Sekolah	Peningkatan wawasan Kependidikan Pengurus Komite	Des 2014, Kantor Dewan Pendidikan Kab Gorontalo
21	Workshop Kader BKKBN se Propinsi Gorontalo	Cara memotivasi Diri untuk Mengedepankan Orang Lain	Oktober 2014, Hotel Megazanur Kota Gorontalo
22.	Workshop Standar pelayanan Minimal	Perencanaan Pembangunan Pelayanan Publik Berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Juli 2014, Hotel Grand Q Kota Gorontalo
23.	Workshop Kependudukan bagi Guru SMA	Pembekalan Guru SMA dalam Pengintegrasian Pendidikan Kependudukan dengan Kurikulum 2013	Juli 2014, Hotel Megazanur Kota Gorontalo

24.	Seminar dan Diskusi Nasional	Jaminan Produk Halal: Keniscayaan di Negara Mayoritas Muslim Terbesar di Dunia	17-18 Sep 2014 Universitas Sahid Jakarta
25.	Workshop/Pembekalan Materi Pendidikan dan Kependudukan kepada Guru-guru SLTA sederajat se Kota Gorontalo.	Pembekalan Guru SMA dalam Pengintegrasian Pendidikan Kependudukan dengan Kurikulum Tahun 2013	13 September 2014 di Hotel Mega Zanur Gorontalo
26.	Workshop Evaluasi Pelaksanaan Pencapaian SPM Dikdas Tingkat Propinsi Gorontalo	Perencanaan Pembangunan Pelayanan Publik Berbasis Standar Pelayanan Minimum (SPM)	11 Juli 2014 di Maqna Hotel Gorontalo
27.	Bimbingan Teknis E_Learning Bahasa Inggris Repdis Program BERMUTU	Evaluasi dan PPKHB Kegiatan CPD Pokja Tendik	23-27 Mei 2014 di Hotel GH Universal, Bandung Jl. Dr. Setia Budi No. 376 Bandung-Jabar
28.	Pelatihan Instruktur Nasional bagi Guru Inti SMP Mata Pelajaran IPA	<ul style="list-style-type: none"> - Konsep Kurikulum 2013 - Analisis Buku - Perencanaan Pembelajaran dan Penilaian - Praktik Pembelajaran Terbimbing 	9 Mei 17 Mei 2014
29.	Bimbingan Teknis bagi Tim Pengembang dan Guru Pemandu Replikasi dan Diseminasi Program BERMUTU	Laporan Repdis Kegiatan KMF dalam Repdis Program BERMUTU	28 April s/d 2 Mei 2014 di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta
30.	Bimbingan Teknis bagi Tim Pengembang dan Guru Pemandu Replikasi dan Diseminasi Program BERMUTU	Kompetensi, Tugas dan Kewenangan Tim Pengembang dan Guru Pemandu	28 April s/d 2 Mei 2014 di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta
31.	Workshop Perencanaan dan Pengembangan Teori Belajar dan Motivasi	Teori Belajar dan Motivasi	23 s/d 24 Desember 2013 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ternate
32.	Workshop Perencanaan dan Pengembangan Teori Belajar dan Motivasi	Pendidikan sebagai Sistem	23 s/d 24 Desember 2013 di (STAIN) Ternate
33.	PLPG Bagi Guru Pendidikan dan Kebudayaan Rayon 128 Universitas Negeri Gorontalo.	Kebijakan Pengembangan Profesi Guru.	19 Okt 2013 SMP Negeri 2 Telaga,
34.	Sosialisasi dan Diseminasi	Pembangunan Berwawasan	Hotel New Rahmat,

	Program Pengendalian Penduduk Bagi Stakeholder dan Mitra Kerja.	Kependudukan di Propinsi Gorontalo	Senin, 23 Sep 2013
35.	International Seminar “Quality Assurance and ICT” in order to 50 years UNG Gold	The attainment of the minimal service standard toward national standard school quality education as an indicator of.	5 September 2013, Ged Misfala Gorontalo
36.	Seminar Implementasi SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten Pohuwato	Langkah-langkah Stategis Menuju Pencapaian SPM tahun 2013	30 Agustus 2013, Aula Pola Bupati Pohuwato.
37.	Seminar Nasional dalam Rangka Satu Dasawarsa Kabupaten Pohuwato dengan Tema “Mewujudkan Pendidikan Berkualitas, Bermartabat dan Berkarakter”.	Pentingnya Pendidikan Bermartabat dan Berkarakter”	29 April 2013, Aula Kantor Bupati Pohuwato
38.	Muswil IKATAN MAH. GEOGRAFI INDONESIA REGION V (Indonesia Timur)“Eksistensi Peran IMAHAGI Sebagai Wahana Intelektual Muda dalam Pengelolaan Pembangunan Nasional yang Berkeadilan Wilayah Menuju Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Gorontalo, 4-9 Maret 2013	Problematika Guru dan Aktualisasi Pendidikan Geografi dalam Pengelola-an Sumber Daya Alam	04 Maret 2013, Gedung Serbaguna UNG
39.	EI/LARARFORBUNDET / ASEAN WOMEN’S NETWORK Project Committee Meeting.	Strategic Plan 2013/2014 Empowering the Women Activity of PGRI	12 – 14 December 2012 Kuala Lumpur, Malaysia
40.	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menuju Pemantapan Karakter Bangsa	Pemantapan Karakter Bangsa	23 November 2012
41.	Seminar Pendidik Peningkatan Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menuju Pemantapan Karakter Bangsa	Profesionalisme Pendidik	22 November 2012, Kabupaten Pohuwato
42.	Sosialisasi Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan di Propinsi Gorontalo oleh Lemhannas RI Jakarta	Kearifan Lokal Merubah Pola Pikir (Mind-Set) dan Budaya Kerja (Cultus-Set) Aparat Pemda Prov. Gorontalo.	14 Juni 2012, Gorontalo
43.	Fasilitasi Kebijakan dan Strategi Advikasi/KIE Pembangunan Kependudukan dan KB Tingkat Gorontalo	Peangunan Berwawasan Kependudukan	13 Juni 2012, Gedung Yuliana.

44.	Rakernas I Dewan Pimpinan Daerah “Alhidayah” Kab Boalemo.	Memupuk Semangat dan Jiwa Enterpreneur Kaum Perempuan	11 Juni 2012
45.	Pertemuan Rutin Ikatan Istri – Istri Bank Indonesia	Keseimbangan Karir Dan Keluarga	7 Maret 2012 Bank Ind Gorontalo
46.	Pertemuan HMJ Biologi	Trik-trik Penulisan Karya Tulis Ilmiah	10 Feb 2012 Fak MIPA UNG
47.	Diklat Pengrus Pramuka se Gtlo	Kursus Pengelolaan Dewan Kerja (KPKD) Di Kwarda	6 Feb 2012 Kwarda Gtlo

G. Pengalaman Penulisan Buku Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Hlmn	Penerbit
1.	Potensi Jagung dan Limbah Jagung Komoditas Ekonomi Produktif “Belajar dari Pemberdayaan Kelembagaan Petani di Kabupaten Boalemo” ISBN: 978-979-1340-74-8	2014	87	UNG Pres. Gorontalo (Anggota IKAPI)
2.	Kapang Kontaminan Bahan Pangan (Buku) ISBN 979-26-8701-7	2013	98	Nurul Jannah
3.	Menyelesaikan Skripsi Dalam Waktu Satu Semester Edisi .. (Revisi) (Buku, ISBN. 979-695-603-9)	2007	159	PT. Gramedia Sarana Indonesia Jakarta
4.	Buku “Kapang Kontaminan Bahan Pangan” ISBN 979-26-8701-7	2006	205	Penerbit “Nurul Jannah”
5.	Buku “Pengantar Pembelajaran MIPA” ISBN 979-26-8702-5FD	2006	178	Penbit “Nurul Jannah”
6.	Buku “Mikrobiologi Dasar” ISBN 979-26-8700-9	2006	174	Penerbit “Nurul Jannah

H. Perolehan HKI dalam 5 Tahun Terakhir

NNo.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	Disain Merk	2016		W.26.-HI.06.01-1601

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respons Masyarakat
1.	Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal	2014	Propinsi Gorontalo	Baik
12.	Peraturan Daerah Propinsi Gorontalo No .. Tahun 2013 tentang	2013	Badan Penanggulangan Bencana Propinsi	Baik

	Penanggulangan Bencana		orontalo	
23.	Peraturan Gubernur No. ... Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	2013	Dinas Pendidikan Se Gorontalo	Baik
4.	Grand Design Kependudukan Gorontalo	2012	Propinsi Gorontalo	Baik
5.	Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No. 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. (Produk PILOT BERMUTU/ <i>Better Education Reformed Management and Universal Teacher Upgrading</i>)	2009	Satuan Pendidikan se Kab. Gorontalo dan didesiminasi ke 4 Kab Piloting di Indonesia (Sukabumi, Marauke, Tanah Datar, dan NTB)	Sangat dibutuhkan

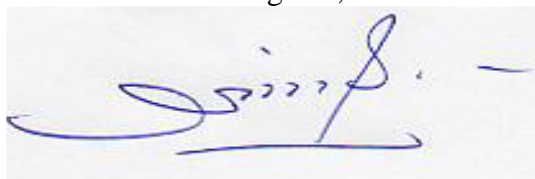
J. Penghargaan yang Pernah Diraih Dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi atau Institusi lainnya)

NO.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	Prestasi dalam Memimpin PGRI Gorontalo sebagai Pembayar Iuran Terbaik Nasional	PB PGRI Jakarta	Medan, 27 Januari 2017
92.	Prestasi dalam Memimpin PGRI Gorontalo sebagai Pembayar Iuran Terbaik Nasional	PB PGRI Jakarta	Ambon, 29 Januari 2016
93.	Prestasi dalam Memimpin PGRI Gorontalo sebagai Pembayar Iuran Terbaik Nasional	PB PGRI Jakarta	Padang, 30 Januari 2015
94.	Prestasi dalam Memimpin PGRI Gorontalo sebagai Pembayar Iuran Terbaik Nasional	PB PGRI Jakarta	Jakarta, 26 Januari 2014
5.	Finalis Dosen Berprestasi Nasional	Dirjen Dikti	Jakarta, Juli 2012
6.	Lencana Darma Bakti	Kwartir Nasional Gerakan Pramuka	Jakarta, 2 Agustus 2012
7.	Dosen Berprestasi Universitas Gorontalo Terbaik I	Rektor Universitas Negeri Gorontalo	Mei 2012
58.	Indonesian Golden Achievement Award.	Yayasan Penghargaan Indonesia.	Bali, 20 Des 2010
49.	Kartini Award ” Dalam rangka memperingatihari lahirnya pelopor kemajuan perempuan Indonesia” Bandung 2009-2010.	Yayasan Penghargaan Indonesia.	Bandung, 30 April 2010
10	Tokoh Indonesia 2010	Yayasan Penghargaan Indonesia di Jakarta	20 Des 2010
11.	Dosen Berprestasi Terbaik II di Fakultas MIPA UNG	Dekan FMIPA UNG	2009

12.	Tanda Kehormatan "Satyalancana Karyasatya"	Presiden RI DR. H. Susilo BY	2005
-----	--	------------------------------	------

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan

Gorontalo, 31 Oktober 2019
Pengusul,



Prof. Dr. Hj. Ani M. Hasan, M.Pd

2. Anggota Tim Peneliti 1

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Dr. Rosman Ilato, M.Pd (L)
2	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala

3	Jabatan Struktural	-
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	196004231986031001
5	NIDN	0023046006
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Gorontalo, 23 April 1960
7	Alamat Rumah	Jalan Kalimantan, Nomor 114, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo
8	Nomor Telepon/Faks/HP	0435 821125/0435 821752/081356105123
9	Alamat Kantor	Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6 Kota Gorontalo
10	Nomor Telepon/Faks	0435 821125/0435 821752
11	Alamat E-mail	rosman_ilato@yahoo.co.id
12	Lulusan yang telah dihasilkan	Strata 2 = 16 orang Strata 1 = 286 orang Diploma 3 = 42 orang
13. Mata Kuliah yang diampu		1. Administrasi Pembangunan (S3)
		2. Manajemen Sumber Daya Manusia (S3 / S2 / S1)
		3. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi (S2/S1)
		4. Ekonomi Kebijakan Publik (S1)
		5. Administrasi Publik (S1 dan DIII)
		6. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya (S1)
		7. Evaluasi Pendidikan (S1)
		8. Metodologi Penelitian (S1)
		9. Penilaian Hasil Belajar (S1)

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	FKIP Unsrat Manado di Gorontalo	IKIP Negeri Yogyakarta	Universitas Negeri Makassar
Bidang Ilmu	Pendidikan Ekonomi Umum	Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	Administrasi Publik
Tahun Masuk-Lulus	1979-1984	1993-1996	2007-2011
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Perbedaan hasil belajar siswa dari penggunaan metode Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi di SMA Prasetya Gorontalo	Manajemen Koperasi Mahasiswa FKIP Unsrat Manado di Gorontalo	Kajian pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Gorontalo
Nama Pembimbing/Promotor	1. Drs. Kadir Abdussamad	3. Prof.Dr. Suyanto,	5. Prof.Dr. Rakhmat, M.Si

	2. Drs. Yamin Cono, B.Sc	4. M.Ed Prof.Dr. Zamroni, MA	6. Prof.Dr. Andi Makkulau 7. Prof.Dr. Yulianto Kadji, M.Si
--	--------------------------	------------------------------	---

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1	2010	Pengaruh Program Stimulus Pembangunan Infrastruktur terhadap Status Sosial Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, Juli 2010	BAPPEDA Kabupaten Boalemo	100.000.000
2	2010	Profil Masyarakat Nelayan di Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo, Agustus 2010	BAPPEDA Kabupaten Gorontalo Utara	100.000.000
3	2010	Kajian Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Gorontalo, November 2010	Research Grand, Program IM'HERE Dikti	30.000.000
4	2011	Kajian Daerah Pembentukan Kabupaten Gorontalo Barat Provinsi Gorontalo, Juli 2011	BAPPEDA Kabupaten Pohuwato	150.000.000
5	2011	Analisis Kinerja Kelembagaan DPRD Provinsi Gorontalo, Agustus 2011	DPD-RI	200.000.000
6	2012	Kualitas Layanan Akademik Pada Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo	Research Grand, Program IM'HERE Dikti	30.000.000
7	2012	Pengembangan Kapasitas Manajemen Program Studi Melalui Penilaian Program Studi Berprestasi di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo	Hibah Penelitian BOPTN Dikti	35.000.000
8	2012	Analisis Rantai Nilai Komoditas Jagung di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo	Kerja sama Bappenas dengan GIZ Jerman	100.000.000
9	2013	Analisis Rantai Nilai Komoditas Jagung Serta Strategi Peningkatan	Ditjen Dikti, Kemendibud	157.500.000

		Pendapatan Petani Jagung di Provinsi Gorontalo (Tahun Pertama)	(MP3EI)	
10	2014	Analisis Rantai Nilai Komoditas Jagung Serta Strategi Peningkatan Pendapatan Petani Jagung di Provinsi Gorontalo (Tahun Kedua)	Ditjen Dikti, Kemendibud (MP3EI)	150.000.000
11	2015	Analisis Rantai Nilai Komoditas Jagung Serta Strategi Peningkatan Pendapatan Petani Jagung di Provinsi Gorontalo (Tahun Ketiga)	Ditjen Dikti, Kemendibud (MP3EI)	162.000.000
12	2016	Model Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah Dalam Menunjang Perekonomian Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi di Provinsi Gorontalo	Kemenristek (PUPT)	180.000.000
13	2016	Penelitian Komoditas, Produk, Jenis Usaha (KPJU) di Provinsi Gorontalo	Kerjasama Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo dengan Lembaga Penelitian UNG	228.000.000
14	2016	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengolahan Jagung dan Limbah Jagung Menjadi Komoditas Ekonomi Produktif di Kabupaten Boalemo	Kemenristek (MP3EI)	160.000.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1	2011	Tim Penilai Kinerja SKPD dan PNS berprestasi di Kabupaten Boalemo, Semester I, Juli 2011	BAPPEDA Kabupaten Boalemo	50.000.000
2	2011	Tim Penilai Kinerja SKPD dan PNS berprestasi di Kabupaten Pohuwato, September 2011	BAPPEDA Kabupaten Pohuwato	75.000.000
3	2011	Tim Assesment Kualifikasi Kepala Sekolah SMP dan SMA se Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, Oktober 2011	BAPPEDA Kabupaten Pohuwato	75.000.000
4	2011	Tim Assesment Kualifikasi Kepala Sekolah dan Pengawas SD se Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, Desember 2011	BAPPEDA Kabupaten Pohuwato	75.000.000

5	2011	Tim Penilai Kinerja SKPD dan PNS berprestasi di Kabupaten Boalemo, Semester II, Desember 2011	BAPPEDA Kabupaten Boalemo	50.000.000
6	2013	Penyusun Master Plan Pengembangan Komoditas Jagung di Kabupaten Boalemo	BAPPEDA Kabupaten Boalemo	100.000.000

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Volume/ Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1	Pengembangan Kapasitas Pemerintah daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Edisi VX/Okttober-Desember 2009	Kebijakan Publik
2			

F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan/Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			

G. Pengalaman Penulisan Buku Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				

H. Pengalaman Peroleh HKI Dalam 5-10 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respons Masyarakat
1	Tenaga Ahli Regional (TAR) Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah (PELD) Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo (Program Bappenas)	2012 dan 2013	Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo	

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Proposal Penelitian Strategis Nasional Tahun 2018.

Gorontalo, 31 Oktober 2019
Anggota Pengusul,

DR. Rosman Ilato, M.Pd

3. Biodata Anggota Tim Peneliti 2

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Dr. Abd. Rahman Pakaya, M.Si (L)
2	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala

3	Jabatan Struktural	-
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	195812201986031001
5	NIDN	0020125810
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Gorontalo, 20 Desember 1958
7	Alamat Rumah	Jalan Botu Liodu 401, Kelurahan Pohe, Kecamatan Hulondalangi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo
8	Nomor Telepon/Faks/HP	0435 821125/0435 821752/081322225688
9	Alamat Kantor	Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6 Kota Gorontalo
10	Nomor Telepon/Faks	0435 821125/0435 821752
11	Alamat E-mail	rahmanpakaya@unq.ac.id
12	Lulusan yang telah dihasilkan	Strata 2 = 12 orang Strata 1 = 286 orang Diploma 3 = 42 orang
13. Mata Kuliah yang diampu		1. Filsafat Ilmu (S2/S1)
		2. Akuntansi Keuangan Lanjutan (S2)
		3. Manajemen Keuangan Daerah (S2)
		4. Manajemen Keuangan Agribisnis (S2)
		5. Manajemen Strategi (S1)
		6. Penganggaran Bisnis (S1)
		7. Pengambilan Keputusan (S2)
		8. Dasar-Dasar Koperasi (S1)
		9. Pengantar Manajemen (S1)

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	IKIP Negeri Manado	Universitas Padjajaran Bandung	Universitas Padjajaran Bandung
Bidang Ilmu	Pendidikan Ekonomi Perusahaan	Ekonomi Akuntansi	Ilmu-ilmu Ekonomi BKU Manajemen
Tahun Masuk-Lulus	1978-1984	2002-2005	2007-2012
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Pembinaan Kredit Investasi Kecil Bagi Nelayan di Kota Gorontalo Prasetya Gorontalo	Tingkat Kesesuaian Gaya Kepemimpinan Situasional dengan Kematangan Anggota (Survei pada KUD di Kota Gorontalo)	Kepemimpinan Transformasional, Perilaku Wirausaha dan Pengaruhnya terhadap Partisipasi Anggota serta Implikasinya terhadap Kinerja Koperasi di Provinsi Gorontalo
Nama Pembimbing/Promotor	1. Drs. Ismail BokiU 1. Drs. Saleh Badaru	1, Prof.Ir. Tuhpawana P Sandjaja, Ph.D 2. Bayu Kharisma, MM	1. Prof.Dr. Tati Suhartati Joesron, M.S 2. Prof.Dr. Ernie Tisnawati Sule, M.Si 3. Prof.Dr. Suryana

			Soemantri, M.Psi
--	--	--	------------------

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1	2012	Kepemimpinan Transformasional, Perilaku Wirausaha Pengurus dan Pengaruhnya terhadap Partisipasi Anggota serta Implikasinya Terhadap Kinerja Koperasi di Provinsi Gorontalo. (Disertasi)	Biaya sendiri	25.000.000
2	2015	Menganalisis Potensi Daerah Dalam rangka meningkatkan Daya Saing dan Keunggulan Daerah (Survei di Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah)	Bappeda Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah	114.000.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1	2013	Pemberi materi tentang Studi Kelayakan Pengembangan Usaha Koperasi di Kota Gorontalo	Pemda Kota Gorontalo	25.000.000
2	2014	Pembinaan Manajemen Keuangan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Boalemo	Bappeda Boalemo	25.000.000
3	2015	Pembimbing Mahasiswa KKS di Desa Putiana Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara	PNBP UNG	25.000.000
4	2015	Pemateri tentang Manajemen Usaha pada pengusaha UMKM Kota Gorontalo Prakarsa Bank Indonesia Cabang Gorontalo	Bank Indonesia	25.000.000
5	2016	Pemateri pada Pembinaan Manajemen Usaha pada Pengusaha UMKM Provinsi Gorontalo	Forum UMKM Provinsi Gorontalo	25.000.000

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Volume/ Nomor/Tahun	Nama Jurnal
2011	Pengaruh Manajemen Sumberdaya Manusia Strategi dan Manajemen Transformasi Terhadap Keunggulan bersaing	Jurnal Inovasi, Volume 8. No. 3, September 2011 ISSN : 1693-9034	Jinovasi
2012	Kepemimpinan Transformasional, Perilaku Wirausaha Pengurus dan Pengaruhnya terhadap Partisipasi Anggota serta Implikasinya Terhadap Kinerja Koperasi di Provinsi Gorontalo	Indonesian Journal Of Economics and Business. IJEB. Vol 2 No. 3, Desember 2012. ISSN : 2089-919X	Indonesian Journal Of Economics and Business
2013	Tingkat Kesesuaian Gaya Kepemimpinan Ketua dengan Kematangan Anggota Hubungannya dengan Partisipasi Anggota	Jurnal Ekonomi : Trikonomika Vol. 12 No. 2 Desember 2013 ISBN : 1411-514X	Jurnal Ekonomi : Trikonomika

2015	Prociding “Pengaruh Perilaku Wirausaha Terhadap Partisipasi Anggota dan Implikasinya terhadap Kinerja Koperasi di Provinsi Gorontalo.	UNG PRESS Gorontalo. ISBN : 978-979-1340-85-4	UNG PRESS
------	---	---	-----------

F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan/Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Pemateri pada seminar Nasional	Pengaruh Perilaku Wirausaha Terhadap Partisipasi Anggota dan Implikasinya terhadap Kinerja Koperasi di Provinsi Gorontalo.	Universitas Negari Gorontalo, bulan Mei 2015

G. Pengalaman Penulisan Buku Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				

H. Pengalaman Peroleh HKI Dalam 5-10 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respons Masyarakat
1				

J. Penghargaan yang Pernah Diraih Dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi atau Institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Satya Lencana 10 Tahun	Presiden Republik Indonesia	1996
2	Satya Lencana 20 Tahun	Presiden Republik Indonesia	2006
3	Satya Lencana 10 Tahun	Presiden Republik Indonesia	2016

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Proposal Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi Tahun 2019.

Gorontalo, 31 Oktober 2019

Anggota Pengusul,

DR. Abd. Rahman Pakaya, M.Si

Lampiran 3. Profil Lembaga Pengusul



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jalan Jenderal Sudirman No. 6, Gedung Akademik Terpadu Lt. II Kampus Jambura Kota Gorontalo

PROFIL LEMBAGA PERISET

1. Dasar Hukum Pendirian dan Struktur Organisasi Lembaga Periset
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Gorontalo terbentuk berdasarkan Peraturan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga berdasarkan Rencana Induk Penelitian (RIP) sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 19/UN47/2013.
2. Visi dan Misi Lembaga Periset
 - 1) Visi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo
“Menjadi Lembaga Penelitian Mandiri 2017”
 - 2) Misi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo
 - 1) Mendinamisir keterlaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang profesional, inovatif, unggul dan berdaya saing tinggi;
 - 2) Menyelenggarakan sistem pelayanan dan penyediaan data, administrasi dan informasi penelitian secara on line;
 - 3) Melakukan inovasi penelitian untuk menumbuhkan semangat dan aktivitas peneliti menjadi perilaku dan budaya akademik bagi civitas akademika UNG;
 - 4) Memperkuat jejaring kemitraan dan kerja sama dengan pihak pemerintah, swasta, dan stakeholder untuk pelaksanaan penelitian, dan
 - 5) Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian untuk mewujudkan lembaga penelitian yang mandiri.
3. Pimpinan/Manajemen Lembaga Periset
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo dipimpin oleh Ketua LPPM, yang dibantu oleh Sekretaris LPPM. Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri dari Pusat-Pusat Studi, yaitu:
 - 1) Pusat Studi Lingkungan dan Kependudukan
 - 2) Pusat Studi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - 3) Pusat Studi Pengembangan Potensi Daerah, Budaya, dan Inovasi
 - 4) Pusat Studi Kebijakan dan Anti Korupsi
 - 5) Pusat Studi Pengelolaan Publikasi Ilmiah dan Kekayaan Intelektual
4. Fokus Kompetensi dan Prestasi Lembaga Periset (*yang relevan dengan judul riset*)
 - 4.1. Fokus kompetensi

“Strategi Pemberdayaan Potensi Daerah untuk Penguatan Budaya dan Kesejahteraan Masyarakat”

4.2. Prestasi

4.2.1. Publikasi

Publikasi selama 3 (tiga) tahun terakhir (2013, 2014, dan 2015):

Terpublikasi di Jurnal Internasional : 37 judul

Terpublikasi di Jurnal Nasional terakreditasi : 28 judul

Terpublikasi di Jurnal tidak terakreditasi : 181 judul

4.2.2. Paten

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah diperoleh seluruhnya berjumlah 11 (sebelas) HKI

4.2.3. Pengalaman Riset dan Kerja Sama Riset

Pengalaman Kerja Sama Riset, baik dengan Kementerian dan Lembaga lain, Pemerintah Daerah, maupun Swasta, selama 3 (tiga) tahun terakhir (2013, 2014, dan 2015) seluruhnya sudah berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) judul penelitian

4.2.4. Penghargaan Riset (Inovasi)

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Gorontalo sekarang ini sudah termasuk pada Klaster Utama.

4.2.5. Produk Riset/Inovasi (Luaran)

Produk Riset selama 3 (tiga) tahun terakhir (2015, 2016, dan 2017) seluruhnya sudah berjumlah 539 (lima ratus tiga puluh sembilan) judul riset

Gorontalo, 20 Oktober 2019

Mengetahui,

Ketua LPPM-Universitas Negeri Gorontalo



(Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum)
NID/NIK 196804091993032001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jalan: Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
Telepon: (0435) 821125 fax (0435) 821752
Laman: www.ung.ac.id

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR : 902/UN47.KPA/HK.02/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KAJIAN KEBIJAKAN PENDAMPING
PROFESIONAL DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI PROVINSI
GORONTALO KERJASAMA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
DENGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2019**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kajian Kebijakan Pendamping Profesional dalam Pengelolaan Dana Desa di Provinsi Gorontalo, oleh Universitas Negeri Gorontalo bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo, maka dipandang perlu menetapkan Tim Kajian Kebijakan Pendamping Profesional dimaksud;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Tim Kajian Kebijakan Pendamping Profesional Dalam Pengelolaan Dana Desa di Provinsi Gorontalo Kerjasama Universitas Negeri Gorontalo dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menerbitkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Negeri Gorontalo tentang Pembentukan Tim Kajian Kebijakan Pendamping Profesional dalam Pengelolaan Dana Desa di Provinsi Gorontalo Kerjasama Universitas Negeri Gorontalo dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 12 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 605);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1919);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 150/M/KPT/2019 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Negeri Gorontalo.

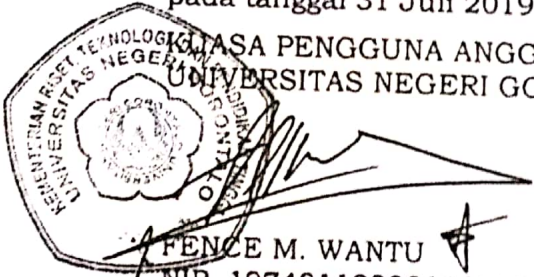
- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Nomor: 137/DPMD-KC/626/VII/2019, Tanggal 5 Juli 2019, Perihal: Pelaksanaan Kerjasama Kajian Kebijakan Pendamping Profesional Tahun Anggaran 2019;
 2. Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNG tanggal 24 Juli 2019 Nomor B/253/UN47.D1/PT.01.05/2019 Perihal: Permohonan Penerbitan SK.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN TIM KAJIAN KEBIJAKAN PENDAMPING PROFESIONAL DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI PROVINSI GORONTALO KERJASAMA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO DENGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI GORONTALO TAHUN 2019.**

- KESATU : Membentuk Tim Kajian Kebijakan Pendamping Profesional Dalam Pengelolaan Dana Desa di Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2019 Kerjasama Universitas Negeri Gorontalo dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo, yang komposisi dan personallanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim:
a. Mempersiapkan hal yang bersifat teknis dan administratif terkait pelaksanaan Kajian Kebijakan dimaksud;
b. Melakukan koordinasi bersama Universitas Negeri Gorontalo dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan kebijakan dimaksud;
c. Melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan Kajian Kebijakan dimaksud kepada Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
- KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan surat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 31 Juli 2019

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

PENCE M. WANTU
NIP. 197401192001121001

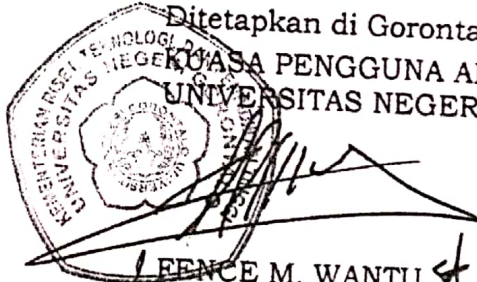
Tembusan Yth:

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo;
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNG;
3. Para Dekan dan Direktur di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR: 902/UN47.KPA/HK.02/2019
TANGGAL: 31 JULI 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KAJIAN KEBIJAKAN
PENDAMPING PROFESIONAL DALAM
PENGELOLAAN DANA DESA DI PROVINSI
GORONTALO KERJASAMA UNIVERSITAS
NEGERI GORONTALO DENGAN DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2019

- I. Pengarah
- : 1. Prof. John Hendri, M.Si.,Ph.D (Plt. Rektor)
 - 2. Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH (Wakil Rektor II)
 - 3. Prof. Dr. Hasanudin Fatsah, M.Hum (Wakil Rektor IV)
 - 4. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, S.H.,M.Hum (Ketua LPPM)
 - 5. Dr. Lukman A.R. Laliyo, M.Pd.,MM (Sek. LPPM)
- II. Penanggungjawab : Raflin Hineho, S.Pd.,M.Si (Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat)
- III. Pelaksana
- Ketua : Prof. Dr. Ani M. Hasan, M.Pd
 - Anggota : 1. Dr. Rosman Ilato, M.Pd
 - 2. Dr. Jusdin Puluhulawa, M.Si
 - 3. Dr. Abd. Rahman Pakaya, M.Si
 - 4. Drs. Haris Mahmud, M.Si

Ditetapkan di Gorontalo
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,



FENCE M. WANTU
NIP. 197401192001121001

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL

Judul Penelitian : Kajian Kebijakan Pendamping Profesional Dalam
Pengelolaan Dana Desa di Provinsi Gorontalo

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 594/Illmu Administrasi

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Prof. DR. Ani M. Hasan, M.Pd
b. Bidang Ilmu : Pendidikan Biologi
c. Nomor HP : 085395587000
d. Alamat surel (e-mail) : ani.m.hasan@yahoo.co.id
e. Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Gorontalo

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : DR. Rosman Ilato, M.Pd
b. Bidang Ilmu : Administrasi Publik

Anggota Peneliti (2)

a. Nama Lengkap : DR. Abd. Rahman Pakaya, M.Si
b. Bidang Ilmu : Manajemen

Anggota Peneliti (3)

a. Nama Lengkap : DRS. Haris Mahmud, S.Pd, M.Si
b. Bidang Ilmu : Sosiologi

Anggota Peneliti (4)

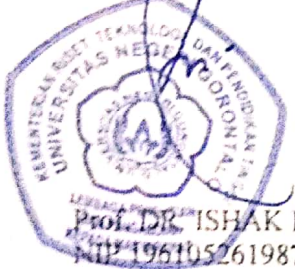
a. Nama Lengkap : Jupriyanto Puluhulara, SH, MH
b. Bidang Ilmu : Hukum

Lama Penelitian Keseluruhan : 3bulan

Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp.250.000.000.

Gorontalo, 15 November 2019

Mengetahui
Ketua LPPM Universitas Negeri Gorontalo,



Ketua Peneliti,

Prof. DR. Ani M. Hasan, M.Pd
NIP. 196004231986031001